



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 323 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>North Hub Development Project</i> Selat Makassar;</li> <li>• Penyediaan dan permintaan produk turunan;</li> <li>• Pengembangan sektor industri aneka;</li> <li>• Fasilitasi Layanan pemberdayaan penyuluh;</li> <li>• Penyusunan Rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki;</li> <li>• Pengembangan industri makan dan minum, kulit, dan alas kaki;</li> <li>• Fasilitasi Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) industri padat karya terampil;</li> <li>• Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (Kota Balikpapan);</li> <li>• Pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (<i>Buy the Service</i>) di Kota Balikpapan;</li> <li>• Pembangunan Bendungan Marangkayu;</li> <li>• Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.</li> </ul>
<b>A8</b> <b>A9</b>	Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan  <ul style="list-style-type: none"> <li>• A8: Kota Samarinda</li> <li>• A9: Kota Balikpapan</li> </ul>	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan <i>output</i> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi;</li> <li>• Penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda-Zona Kota Tua);</li> <li>• Pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (IPLT) di Kota Balikpapan;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• Pengendalian Banjir Kota Samarinda;</li> <li>• Pembangunan jalan Tol Balikpapan – Samarinda;</li> <li>• Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Balikpapan (Prioritas Nasional).</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li> <li>• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li> <li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li> <li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;</li> <li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li> <li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li> <li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 325 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>D2</b> <b>D3</b>	Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>• D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu</li> <li>• D3: Kec. Maratua, Kabupaten Berau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa;</li> <li>• Mencetak dan meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan memperhatikan ketahanan iklim.</li> </ul> <p>Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan akses internet;</li> <li>• Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Tering – Long Bagun.</li> </ul>
<b>D4</b>	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D4: KT Kerang, Kabupaten Paser</li> </ul>	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kab. Paser, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan lembaga ekonomi di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul>
<b>E2</b> <b>E3</b> <b>E4</b> <b>E5</b> <b>E6</b>	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan <ul style="list-style-type: none"> <li>• E2: Kabupaten Berau</li> </ul>	<p>Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk kawasan konservasi di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 326 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E3: Kabupaten Kutai Timur</li> <li>• E4: Kabupaten Kutai Kartanegara</li> <li>• E5: Kabupaten Mahakam Ulu</li> <li>• E6: Kabupaten Kutai Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservasi jalan koridor logistik Sp.3 Blusuh – Sp.3 Damai;</li> <li>• Preservasi jalan koridor logistik Sp. Blusuh – Batas Prov. Kalteng;</li> <li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;</li> <li>• Pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Modeling pengembangan produk bioekonomi;</li> <li>• Pemulihan lahan gambut;</li> <li>• Program Desa Mandiri Peduli Gambut;</li> <li>• Cetak sawah;</li> <li>• Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian;</li> <li>• Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial.</li> </ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 327 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan PLTG Kaltim Peaker 2;</li><li>• Pembangunan PLTGu Kaltim-1.</li></ul> <p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan;</li><li>• Pengembangan industri dan UMKM halal;</li><li>• Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional;</li><li>• Penguatan ekosistem halal;</li><li>• Penguatan keuangan syariah;</li><li>• Penguatan dana sosial syariah.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil</li><li>• Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil</li><li>• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung makan bergizi gratis.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;</li><li>• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi Startup Gim Indonesia;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 328 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi Startup Digital;</li><li>• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Pemenuhan Upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;</li><li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li><li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li><li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li><li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li><li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T dengan <i>output</i> dengan <i>output</i> dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan lanjutan pembangunan Bandara Paser (KPBU);</li><li>• Peningkatan Rumah Sakit (RS) tipe D menjadi tipe C;</li><li>• Pengembangan infrastruktur kereta api logistik.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD;</li><li>• Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru SD;</li><li>• Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru SMP;</li><li>• Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru SMA;</li><li>• Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dengan <i>output</i> Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu.</p>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain); <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>;</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran untuk mencegah kasus baru;</li><li>• Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan;</li><li>• Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian;</li><li>• Layanan survei faktor risiko;</li><li>• Layanan pencegahan penyakit TBC;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 331 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan pencegahan dan pengendalian TBC;</li><li>• Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian;</li><li>• Sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) menuju eliminasi dan layanan survei faktor risiko penyakit malaria;</li><li>• Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian;</li><li>• Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS;</li><li>• Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian;</li><li>• Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan output: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan &amp; penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Penyehatan lingkungan, dengan output: Penguatan surveilans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 332 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro, dengan output:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia, penguatan UKS;</li><li>• Kesehatan kerja;</li><li>• Layanan geriatri;</li><li>• Layanan KB berkualitas dan kespro yang komprehensif sesuai dengan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya;</li><li>• Fasilitasi pengelolaan proyek penguatan rumah sakit (RS) layanan kanker, jantung, stroke, <i>uro-nefrologi</i> (KJSU) dan Kesehatan Ibu Anak (KJSU-KIA);</li><li>• Pengembangan layanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan <i>uro-nefrologi</i>;</li><li>• Sistem rujukan berbasis komputer di seluruh kabupaten/kota;</li><li>• Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) mutu dan akreditasi rumah sakit;</li><li>• Sarana puskesmas, pustu dan posyandu (<i>sophi</i>);</li><li>• Investasi pelayanan kesehatan primer;</li><li>• Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 333 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan;</li><li>• Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan Kesehatan Reproduksi.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 334 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Data terpadu kesejahteraan sosial;</li><li>• Data dan informasi ketersediaan pangan;</li><li>• Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;</li><li>• Pengendalian pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);</li><li>• Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE);</li><li>• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;</li><li>• Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan;</li><li>• Pemberian perlindungan kerja melalui Jaminan Sosial, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	<p>Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)</i>, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;</li><li>• Peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan;</li><li>• Gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya;</li><li>• Guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru;</li><li>• Guru Pendidikan Menengah (Dikmen) yang menerima tunjangan khusus;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 335 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru pendidikan menengah (dikmen);</li><li>• Pendidikan khusus (diksus);</li><li>• Penataan guru pendidikan dasar (dikdas).</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi, pelayanan publik lainnya, dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana;</li><li>• Koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;</li><li>• Pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;</li><li>• Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana;</li><li>• Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan;</li><li>• Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana;</li><li>• Penataan bangunan kawasan rawan bencana, dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan bangunan gedung (pbg) berketahanan bencana;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 336 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
		didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Energi Bersih untuk Pertumbuhan dan Pemerataan dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan PLTMH;</li><li>• Pembangunan PLTS;</li><li>• Perluasan DAK Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah adat/ulayat masyarakat adat dengan <i>output</i> pembinaan talenta seni budaya, melalui warisan budaya yang diregistrasi nasional dan ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi.

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -

## Seputar *Highlight* Intervensi **Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara**

### *Ringkasan Prioritas Nasional*



*\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN*



### **4** Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 1

### Jumlah PSN



# 3

### Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
- ❖ Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)
- ❖ Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)

### **7** Kementerian/ Lembaga terkait

- ❖ Otorita Ibu Kota Nusantara
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -

**Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b> <b>A2</b> <b>A3</b>	<p>Kawasan <i>Superhub</i> Ibu Kota Nusantara (IKN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)</li> <li>• A2: Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)</li> <li>• A3: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)</li> </ul>	<p>Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi kebijakan model perencanaan pembangunan daerah khusus;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan (RPK);</li> <li>• Rekomendasi kebijakan urban design development wilayah perencanaan (WP) Ibu Kota Nusantara;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Ibu Kota Nusantara;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan rencana pembangunan infrastruktur kawasan terpadu di wilayah perencanaan Ibu Kota Nusantara;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan penguasaan dan pemilikan bidang tanah;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan pembaruan nilai tanah;</li> <li>• Pengadaan tanah;</li> <li>• Pengendalian banjir IKN.</li> </ul> <p>Pembangunan gedung/perkantoran, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkantoran pemerintahan Negara (kompleks legislatif dan yudikatif);</li> <li>• Pos pengamanan IKN;</li> <li>• Fasilitasi manajemen pengelolaan bangunan dan kawasan (<i>tenant management</i>);</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Layanan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan perkantoran;</li><li>• Layanan PBG-SLF.</li></ul> <p>Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah Susun Negara;</li><li>• Layanan pemeliharaan dan perawatan hunian negara (hunian apartemen, rumah tapak jabatan menteri) dan hunian lainnya (hunian pekerja konstruksi).</li></ul> <p>Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jaringan perpipaan transmisi air minum;</li><li>• Layanan pemeliharaan dan perawatan embung;</li><li>• Pengendalian banjir IKN;</li><li>• Penataan kawasan Sepaku;</li><li>• Analisis dampak lingkungan (AMDAL) kawasan;</li><li>• Dukungan teknis pembangunan sarana dan prasarana IKN;</li><li>• Layanan pemeliharaan dan perawatan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), kawasan ruang terbuka hijau, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), jaringan perpipaan air minum, dan unit pengolahan air minum.</li></ul> <p>Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 340 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jalan tol Segmen 1B Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda;</li><li>• Pembangunan jaringan jalan dan <i>Multi Utility Tunnel</i> (MUT) di Sub WP 1A dan 1B;</li><li>• Layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP IKN;</li><li>• Layanan operasional dan pemeliharaan jalan kawasan.</li></ul> <p>Pemindahan ASN/Hankam, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi pemindahan ASN, TNI/Polri, dan PNA OI ke IKN;</li><li>• Rekomendasi kebijakan implementasi peta jalan pemindahan ASN, TNI/Polri, PNA dan OI ke IKN;</li><li>• Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara;</li><li>• Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem keamanan Ibu Kota Nusantara.</li></ul> <p>Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana teknologi informasi dan komunikasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara;</li><li>• Sistem informasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara;</li><li>• Sistem informasi layanan perizinan dan pemerintahan IKN;</li><li>• Sistem <i>one map nusantara</i>;</li><li>• OM sarana teknologi informasi dan komunikasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di Ibu Kota Nusantara.</li></ul> <p>Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan pelaku budaya lokal (<i>Training of Trainer/ToT</i>);</li><li>• Pembinaan ekonomi masyarakat Ibu Kota Nusantara.</li></ul> <p>Peningkatan investasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi penyusunan <i>feasibility study</i> sektor pendukung;</li><li>• Kerja sama investasi pelopor dan non pelopor;</li><li>• Promosi investasi dan kemudahan berusaha;</li><li>• Fasilitasi penyusunan <i>feasibility study</i> sektor hunian dan non hunian;</li><li>• Promosi skema kontribusi dan kerja sama dengan badan usaha sektor pendukung, hunian dan non hunian;</li><li>• Implementasi pemberian dukungan pemerintah dalam rangka pendanaan/pembiayaan Ibu Kota Nusantara;</li><li>• Dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan IKN.</li></ul> <p>Pengembangan <i>superhub</i> ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi kebijakan pengembangan klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 342 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Festival budaya lokal.</li></ul> <p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas masyarakat lokal delineasi IKN;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi dan sosial budaya masyarakat di satuan permukiman dan pusat SKP;</li><li>• Publikasi/laporan sensus ketenagakerjaan IKN.</li></ul> <p>Pembangunan kesehatan, dengan <i>output</i> Peralatan kesehatan puskesmas.</p> <p>Pembangunan pendidikan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi sarana dan gedung perguruan tinggi vokasi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;</li><li>• Sarana lingkungan fasilitas pendidikan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pendidikan di IKN.</li></ul> <p>Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan dan rehabilitasi hutan;</li><li>• Pengawasan dan pengendalian kehutanan.</li></ul> <p>Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup IKN 2026-2045;</li><li>• Dokumen Status Lingkungan Hidup IKN;</li><li>• Sarana bidang penanganan bencana di wilayah IKN;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 343 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;</li><li>• Pelayanan Persetujuan Lingkungan di Wilayah IKN.</li></ul> <p>Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Strategis Perikanan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara Tahun 2029-2034;</li><li>• Pedoman Pertanian Permanen Agrikultur di IKN;</li><li>• Pengembangan Pertanian Berkelanjutan di IKN;</li><li>• Pelatihan Terpadu Budidaya Perikanan;</li><li>• Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Produksi Pangan di Kawasan IKN;</li><li>• Pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan;</li><li>• Bantuan sarana produksi pertanian pada kawasan transmigrasi di wilayah sekitar.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Kalimantan Utara

### Ringkasan Prioritas Nasional

 **34**  
PN2 *Proyek (highlight)*

 **18**  
PN3 *Proyek (highlight)*

 **78**  
PN4 *Proyek (highlight)*

 **16**  
PN5 *Proyek (highlight)*

 **29**  
PN6 *Proyek (highlight)*

 **5**  
PN7 *Proyek (highlight)*

 **8**  
PN8 *Proyek (highlight)*

\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan  
Bergizi Gratis

### 3

Jumlah  
PSN



### Lokasi Prioritas

- ❖ Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan
- ❖ Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning
- ❖ Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
- ❖ Kawasan Transmigrasi (KT) Salim Batu
- ❖ Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan

### 33 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- ❖ Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 345 -

**Provinsi Kalimantan Utara**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A1 A2</b>	<p>Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: Kota Tarakan</li><li>• A2: Kabupaten Bulungan</li></ul>	<p>Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP);</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional;</li><li>• Perluasan SPAM Gunung Seriang, Kab. Bulungan.</li></ul>
<b>A3</b>	<p>Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A3: Kabupaten Bulungan</li></ul>	<p>Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, terutama fokus pada Kawasan Industri Kalimantan <i>Industrial Park</i> Indonesia (KIPI), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan <i>Eco Industrial Park</i> (KI berwawasan lingkungan);</li><li>• <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) bidang jasa dan kawasan;</li><li>• Peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan;</li><li>• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar;</li><li>• Pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita;</li><li>• Rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN;</li><li>• Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 346 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan penerbangan umum dan perintis;</li> <li>• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas;</li> <li>• Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri;</li> <li>• Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri;</li> <li>• Kawasan Industri Tanah Kuning.</li> </ul>
<b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b>	<p>Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan</li> <li>• D2: PKSN Long Nawang dan</li> </ul>	<p>Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi;</li> <li>• Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Malinau - Long Semamu;</li> <li>• Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kab. Nunukan;</li> <li>• Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Nunukan melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• D3: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung</li></ul>	
<b>D4</b>	<p>Kawasan Transmigrasi (KT), Salim Batu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• D4: Kabupaten Bulungan</li></ul>	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kab. Bulungan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sarana permukiman;</li><li>• Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li><li>• Pemberian bantuan peralatan pascapanen di kawasan transmigrasi;</li><li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li><li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li></ul>
<b>E1</b> <b>E2</b>	<p>Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E1: Kabupaten Nunukan</li><li>• E2: Kabupaten Malinau</li></ul>	<p>Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk kawasan konservasi di Wilayah Kalimantan Utara, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi;</li><li>• Penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;</li><li>• Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;</li><li>• Pengembangan produk melalui agroforestri;</li><li>• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;</li><li>• Perlindungan serta pengamanan hutan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Pemenuhan upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan input dan sarana dan prasarana pertanian;</li><li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li><li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li><li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li><li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li><li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;</li><li>• Pengembangan ternak ruminansia potong.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 349 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan;</li><li>• Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• MoU kemitraan jaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk bagi usaha kecil;</li><li>• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung makan bergizi gratis.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 350 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan.</li></ul> <p>Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Jalan Long Nawang – Pos PLBN, BTS Kab. Malinau – Binuang;</li><li>• Jalan Akses PLBN Long Nawang, Malinau – Long Semamu, Long Boh – Metulang – Long Nawang;</li><li>• Pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>);</li><li>• Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pembinaan bank sampah &amp; kelompok masyarakat pengelola sampah;</li><li>• Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir;</li><li>• Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan subsidi perumahan melalui</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 351 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), optimalisasi dana desa untuk perumahan, serta penanganan pemukiman kumuh terpadu;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan SPAM Kuala Lapang Kabupaten Malinau.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);</li><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li><li>• Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;</li><li>• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Kalimantan Utara pada Kab/Kota Bulungan, Nunukan, Malinau;</li><li>• Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Peningkatan infrastruktur digital dan TIK dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memenuhi cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>Antenatal Care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) - Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Perbaiki gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS;</li><li>• Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 353 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);</li><li>• Menanggulangi TB di tempat kerja;</li><li>• Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;</li><li>• Melakukan penemuan aktif dan skrining <i>mobile</i> penyakit menular (kusta, HIV/AIDS, filariasis, frambusia);</li><li>• Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta;</li><li>• Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC;</li><li>• Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;</li><li>• Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS di Kota Tarakan;</li><li>• Penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyediakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;</li><li>• Melakukan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 354 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li><li>• Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li><li>• Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Penyehatan lingkungan, dengan <i>output</i>: Penguatan <i>surveilans</i> kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 355 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan vokasi di sektor strategis;</li><li>• Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA);</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> : talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi (Iptekin) dalam Pembangunan Nasional, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis;</li><li>• Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin;</li><li>• Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);</li><li>• Melakukan penguatan kapasitas <i>Science Techno Park</i> (STP);</li><li>• Mengembangkan <i>pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di daerah;</li><li>• Mengembangkan <i>pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas;</li><li>• Mengembangkan <i>pilot project hub</i> prioritas tematik Iptekin di BRIN;</li><li>• Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan satu basis data tunggal sebagai dasar pensasaran target program bantuan pemerintah;</li><li>• Verifikasi validasi data dan meningkatkan cakupan penerima program PIP khususnya pada tingkat SMTK/SMAK;</li><li>• Penyediaan beasiswa/bantuan Paket C untuk masyarakat miskin dan rentan agar dapat memiliki ijazah SMA;</li><li>• Pembangunan pusat distribusi pangan murah di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 357 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan layanan dasar infrastruktur desa.</li></ul> <p>Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);</li><li>• Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);</li><li>• Penerapan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan.</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui Penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 wilayah darat.</p>
	Provinsi Kalimantan Utara	<p>Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merevitalisasi bangunan Satuan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 358 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun unit sekolah baru satuan di seluruh jenjang pendidikan;</li><li>• Merevitalisasi bangunan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Membangun unit sekolah baru di seluruh jenjang pendidikan;</li><li>• Merevitalisasi bangunan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Membangun unit sekolah baru di seluruh jenjang pendidikan;</li><li>• Merevitalisasi bangunan di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Membangun unit sekolah baru di seluruh jenjang pendidikan;</li><li>• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang pendidikan;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
	Provinsi Kalimantan Utara	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, melalui: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sulawesi Utara

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 4

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas

- ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang
- ❖ Wilayah Metropolitan Manado
- ❖ Kawasan Perkotaan Sedang Manado dan Bitung
- ❖ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang
- ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Bitung
- ❖ Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Perdesaan MAPALUS Kabupaten Minahasa
- ❖ Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di PKSN dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara

### 36 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Keuangan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 360 -

**Provinsi Sulawesi Utara**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b> <b>A2</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b>	Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang  <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1: Kota Bitung</li> <li>• A2: Kota Manado</li> <li>• A3: Kota Tomohon</li> <li>• A4: Kab. Minahasa</li> <li>• A5: Kab. Minahasa Utara</li> </ul>	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i> , dengan <i>output</i> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservasi jalan ruas Airmadidi-BTS. Kota Tondano;</li> <li>• Pengadaan <i>event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)</i>;</li> <li>• Sertifikasi SDM;</li> <li>• Pengembangan PDSKU Manado;</li> <li>• Kerja sama dengan maskapai;</li> <li>• Promosi wisata minat khusus;</li> <li>• Advokasi investasi;</li> <li>• Akses pembiayaan <i>Startup</i>;</li> <li>• Penataan Kawasan Tondano;</li> <li>• Pelaksanaan operasi SAR.</li> </ul>
<b>A6</b> <b>A7</b> <b>A8</b> <b>A9</b> <b>A10</b>	Wilayah Metropolitan Manado  <ul style="list-style-type: none"> <li>• A6: Kota Bitung</li> <li>• A7: Kota Manado</li> <li>• A8: Kota Tomohon</li> <li>• A9: Kab. Minahasa</li> <li>• A10: Kab. Minahasa Utara</li> </ul>	Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam Sistem Perkotaan Nasional, dengan <i>output</i> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional) - Kota Manado;</li> <li>• Pembangunan Jalan Perkotaan Manado <i>Bypass/Manado Outer Ring Road 3 Tahap IV</i>;</li> <li>• Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung;</li> <li>• Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bitung;</li> <li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik (<i>Backbone</i>) - Kairagi - BTS. Kota Manado;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 361 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Manado;</li> <li>• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL) Kota Manado;</li> <li>• Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Manado;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Manado melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana IAIN Manado melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• <i>Pilot project</i> kerja sama antardaerah dan multipihak;</li> <li>• Penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L;</li> <li>• Penguatan <i>smart city</i>;</li> <li>• Penguatan kelembagaan pengelola WM Manado;</li> <li>• Mediasi dan Advokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan.</li> </ul>
<b>A11</b> <b>A12</b>	Kawasan Perkotaan Sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>• A11: Kota Manado</li> <li>• A12: Kota Bitung</li> </ul>	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado dan Bitung, dengan <i>output</i> pembangunan tanggul sungai.
<b>A13</b>	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 362 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A13: Kab. Minahasa Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK;</li> <li>Peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK;</li> <li>Pelayanan investasi administrator KEK tipe A.</li> </ul>
<b>B1</b>	Kawasan Perikanan Tangkap Bitung B1: Kota Bitung	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, dengan <i>output</i> pemberian pelatihan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
<b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>B6</b>	Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> <li>B2: Kab. Bolaang Mongondow Utara</li> <li>B3: Kab. Bolaang Mongondow</li> <li>B4: Kab. Minahasa Selatan</li> <li>B5: Kota Kotamobagu</li> <li>B6: Kota Tomohon</li> </ul>	Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang <i>modern</i> , terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian dukungan keterjangkauan pengembangan kawasan pertanian;</li> <li>Pengembangan Bendungan Lolak;</li> <li>Pengembangan kawasan kelapa;</li> <li>Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;</li> <li>Rekomendasi kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan;</li> <li>Kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional.</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>D1: Kawasan Perdesaan MAPALUS, Kabupaten Minahasa</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perdesaan MAPALUS, Kabupaten Minahasa, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li> <li>Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 363 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li> <li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;</li> <li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li> <li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li> <li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li> <li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li> </ul>
<b>D2</b>	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> :
<b>D3</b>		
<b>D4</b>		
<b>D5</b>		
<b>D6</b>		
<b>D7</b>		
<b>D8</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi;</li> <li>• Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di Jln. Lingkar Miangas;</li> <li>• <i>Replacement</i> Fasilitas Pelabuhan Matutuang di Kab. Kepulauan Sangihe.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D2: PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kabupaten Kepulauan Sangihe</li> <li>• D3: PKSN Melonguane dan Kecamatan</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	<p>Perbatasan Prioritas (Kec. Damau, Kec. Pulutan, dan Kec. Nanusa), Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="354 997 688 1330">• D4: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siau Barat, Kec. Siau Barat Utara) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro</li><li data-bbox="354 1355 688 1615">• D5: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Likupang Barat, Kec. Wori) Kabupaten Minahasa Utara</li><li data-bbox="354 1640 688 1973">• D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tatapan, Kec. Tenga, Kec. Sinonsayang) Kabupaten Minahasa Selatan</li><li data-bbox="354 1998 688 2260">• D7: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolaang Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow</li></ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 365 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>D8: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolangitang Barat, dan Kec. Pinogaluman) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara</li></ul>	
<b>E1</b>	<p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>E1: Kota Kotamobagu</li></ul>	<p>Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peralatan <i>intensity meter</i> dan <i>accelerograph</i> melalui Indonesia <i>Disaster Resilience Initiatives Project</i> (IDRIP);</li><li>Perapatan stasiun Indonesia <i>Continuously Operating Reference Station</i> (Ina-CORS);</li><li>Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api;</li><li>Rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencana.</li></ul>
	<p>Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Pemenuhan Upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li><li>Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li><li>Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li><li>Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 366 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li><li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Replacement</i> Fasilitas Pelabuhan Matutuang;</li><li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan permukiman kumuh terpadu.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan infrastruktur jaringan distribusi tenaga listrik;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tahuna I di Kabupaten Minahasa;</li><li>• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU);</li><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li><li>• Peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari;</li><li>• Perluasan akses internet cepat.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dan akses kesehatan reproduksi perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ibu hamil dan balita yang mendapat <i>buffer stock</i>;</li><li>• Kegiatan surveilans gizi dan KIA;</li><li>• Pelatihan <i>stunting</i>;</li><li>• Kampanye pencegahan <i>stunting</i>;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>neonatal</i>, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 368 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan Kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;</li><li>• Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;</li><li>• Daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi;</li><li>• Model kurikulum yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M;</li><li>• Tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja;</li><li>• Sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia;</li><li>• Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon);</li><li>• PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja;</li><li>• Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus;</li><li>• Bimbingan teknis dan supervisi <i>stunting</i>/AKI, perubahan iklim, kespro.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan 5 pilar STBM.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, PIMS, malaria, frambusia, dan <i>zoonosis</i> bagi masyarakat;</li><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li><li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;</li><li>• Pelaksanaan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, PIMS, malaria, frambusia, dan <i>zoonosis</i>;</li><li>• Pelaporan kasus penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, PIMS, malaria, frambusia, dan <i>zoonosis</i> oleh fasyankes swasta;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, PIMS, malaria, frambusia, dan <i>zoonosis</i>.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi Layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN;</li><li>• Instalasi farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar;</li><li>• Peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif;</li><li>• Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga kesehatan yang diorientasi/dilatih manajemen puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Tenaga kesehatan yang diorientasi/diberikan pelatihan (SOPHI);</li><li>• Pelatihan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu (SOPHI);</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi;</li><li>• Sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara;</li><li>• Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis;</li><li>• Peningkatan kompetensi melalui program <i>fellowship</i>;</li><li>• Pembangunan Asrama Siswa khususnya di daerah kepulauan dan sulit akses;</li><li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li><li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak).</li></ul>
Provinsi Utara	Sulawesi	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 372 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;</li><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap di dunia usaha dan dunia industri, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 374 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</li><li>• Pengembangan bidang <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Math</i> (STEAM);</li><li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Nusa Utara melalui Pembiayaan SBSN;</li><li>• SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri;</li><li>• Pelatihan pertanian bagi aparatur;</li><li>• Sertifikasi profesi bidang pertanian;</li><li>• Pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian;</li><li>• Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan;</li><li>• Kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.</li></ul>
Provinsi Utara	Sulawesi	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga, melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
Provinsi Utara	Sulawesi	Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan sanitasi bersih;</li><li>• Supervisi progres pembangunan penyaluran BBM 1 Harga dan/atau</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 375 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>pengawasan operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);</li> <li>• Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk);</li> <li>• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;</li> <li>• Penyediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;</li> <li>• Penyediaan Program Kartu Usaha Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan;</li> <li>• Bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>• Penguatan regulasi, monitoring, dan pemutakhiran data tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD;</li> <li>• Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);</li> <li>• Penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau pulau kecil terluar, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Manado;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 376 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peralatan <i>intensity meter</i> dan <i>accelerograph</i> melalui IDRIP;</li><li>• Peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi;</li><li>• Dokumen harmonisasi RPerpres RDTR KPN;</li><li>• Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;</li><li>• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan <i>stakeholder</i> lain;</li><li>• Pembangunan prasarana pengaman pantai;</li><li>• Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut;</li><li>• <i>Oceans for Prosperity LAUTRA</i> - Kawasan Konservasi Laut Sulawesi Bagian Utara;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif <i>di antaranya</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li><li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 377 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Utara	<p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 378 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sulawesi Tengah

### Ringkasan Prioritas Nasional



**16**  
Proyek  
*(highlight)*

PN1



**30**  
Proyek  
*(highlight)*

PN2



**44**  
Proyek  
*(highlight)*

PN3



**100**  
Proyek  
*(highlight)*

PN4



**15**  
Proyek  
*(highlight)*

PN5



**48**  
Proyek  
*(highlight)*

PN6



**7**  
Proyek  
*(highlight)*

PN7



**25**  
Proyek  
*(highlight)*

PN8

\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

9

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali (Bahodopi)
- ❖ Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Tengah
- ❖ Kawasan Pertanian Pangan
- ❖ Kawasan Sentra Hilirisasi Rumput Laut
- ❖ Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka, Kabupaten Morowali
- ❖ Kecamatan Perbatasan Prioritas
- ❖ Kawasan Transmigrasi (KT) Tampolore (Poso), Bungku (Morowali), dan Palolo (Sigi)
- ❖ Kawasan Konservasi
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu

### 39 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 380 -

**Provinsi Sulawesi Tengah**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b>	Kawasan Perkotaan Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1: Kabupaten Morowali (Bahodopi)</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan <i>output</i> Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea.
<b>A2</b> <b>A3</b> <b>A4</b>	Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2: Kabupaten Morowali (KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Neo Energy Morowali Industrial Estate, dan KI Indonesia Dahuaxing Industry Park)</li> <li>• A3: Kabupaten Morowali Utara (KI Stardust dan KI Indo Mineral Mining)</li> <li>• A4: Kabupaten Parigi Moutong (KI Neo Energy Parimo Industrial Estate)</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust;</li> <li>• Preservasi Jalan Bahodopi-BTS Prov. Sultra dan Jalan Bungku – Bahodopi;</li> <li>• Penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal;</li> <li>• Percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan;</li> <li>• Pengembangan dan penataan kawasan industri;</li> <li>• Fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan;</li> <li>• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas;</li> <li>• Inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri;</li> <li>• Penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri;</li> <li>• Penguatan kebijakan industri logam berbasis pengolahan nikel;</li> <li>• Fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 381 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor;</li> <li>• Fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor;</li> <li>• Pengkajian kebutuhan standar industri hijau;</li> <li>• Sertifikasi industri hijau;</li> <li>• Penguatan standarisasi untuk hilirisasi;</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel di Kab. Morowali;</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan di Kab. Morowali.</li> </ul>
<b>B1</b>	Kawasan Pertanian	Penguatan pengembangan kawasan pertanian menuju swasembada pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan perkebunan komoditas prioritas;</li> <li>• Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> </ul>
<b>B2</b>	Pangan	
<b>B3</b>	• B1: Kabupaten Sigi	
<b>B4</b>	• B2: Kabupaten Donggala	
<b>B5</b>	• B3: Kabupaten Poso	
<b>B6</b>	• B4: Kabupaten Parigi Moutong	
	• B5: Kabupaten Buol	
	• B6: Kabupaten Tolitoli	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 382 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;</li> <li>• Preservasi ruas jalan Tolai-Sausu di Kabupaten Parigi Moutong, Tagolu-Tentena;</li> <li>• Preservasi jalan Kalawara - Kulawi.</li> </ul>
<b>B7</b>	Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah  <ul style="list-style-type: none"> <li>• B7: Kabupaten Banggai Kepulauan</li> </ul>	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan <i>output</i> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bibit rumput laut;</li> <li>• Penyaluran sarana budi daya rumput laut.</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan Perdesaan Prioritas  <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka, Kabupaten Morowali</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka, Kabupaten Morowali, dengan <i>output</i> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li> <li>• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li> <li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li> <li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;</li> <li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li> <li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 383 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li> <li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li> </ul>
<b>D2</b> <b>D3</b>	Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>• D2: Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol</li> <li>• D3: Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli</li> </ul>	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Pemenuhan Layanan Dasar Infrastruktur Desa.</li> </ul>
<b>D4</b> <b>D5</b> <b>D6</b>	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D4: KT Tampolore, Kabupaten Poso</li> <li>• D5: KT Bungku, Kabupaten Morowali</li> <li>• D6: KT Palolo, Kabupaten Sigi</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kab. Poso, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jembatan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian bantuan peralatan pascapanen di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li> </ul> Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bungku di Kab. Morowali, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 384 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li> </ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kab. Sigi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jembatan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul>
<b>E1</b>	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah	<p>Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tolitoli, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan;</li> <li>• Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi;</li> <li>• Penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah;</li> <li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li> </ul>
<b>E2</b>		
<b>E3</b>	• E1: Taman Nasional Lore	
<b>E4</b>	Lindu,	
<b>E5</b>	Kabupaten Sigi	
<b>E6</b>	• E2: Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una	
	• E3: Kabupaten Banggai	
	• E4: Kabupaten Banggai Kepulauan	
	• E5: Kabupaten Banggai Laut	
	• E6: Kabupaten Tolitoli	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 385 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis dan vegetatif di DAS yang dipulihkan;</li> <li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKD Banggai Dalaka;</li> <li>• Penyediaan Benih Berkualitas, Bibit Berkualitas, Bibit Produktif dan Bibit Hasil Pemberdayaan Masyarakat.</li> </ul>
<b>E7</b>	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu <ul style="list-style-type: none"> <li>• E7: Kota Palu</li> </ul>	Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li> <li>• Penataan bangunan dan <i>Infrastructure Reconstruction Sector Loan</i> (IRSL).</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Bungin;</li> <li>• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan/atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Donggala;</li> <li>• Pembangunan jalan koridor logistik dalam rangka pelaksanaan <i>Infrastructure Reconstruction Sector Loan</i> (IRSL).</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan listrik dan telekomunikasi/internet, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 386 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan Layanan Dasar Infrastruktur Desa;</li><li>• Perluasan SPAM - Optimalisasi SPAM Puncak dan SPAM Pasar Ganti Kab. Donggala;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dan digitalisasi masyarakat;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik;</li><li>• Pengembangan pengendalian pembangunan pembangkit listrik;</li><li>• Pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;</li><li>• Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), pembangunan infrastruktur transmisi, interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk;</li><li>• Penerapan tata kelola persampahan di daerah;</li><li>• Pembinaan generasi muda yang mempunyai aksi peduli cinta alam;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan pembinaan implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> </ul> <p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);</li> <li>• Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk);</li> <li>• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;</li> <li>• Penyediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;</li> <li>• Penyediaan Program Kartu Usaha Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan;</li> <li>• Bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat;</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 388 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan regulasi, monitoring, dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD;</li><li>• Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);</li><li>• Penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data.</li></ul> <p>Eliminasi penyakit endemik <i>Schistosomiasis</i> di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan layanan pemantauan untuk pencegahan dan pengendalian <i>Schistosomiasis</i>;</li><li>• Pembinaan program pengendalian <i>Schistosomiasis</i>;</li><li>• Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;</li><li>• Penyediaan makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i> untuk balita;</li><li>• Pelaksanaan pemantauan gizi dan KIA;</li><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi;</li><li>• Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteks ibui dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>neonatal</i>, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 389 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;</li><li>• Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir;</li><li>• Penyediaan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;</li><li>• Penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit endemik <i>Schistosomiasis</i>.</li></ul>
Provinsi Tengah	Sulawesi	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
Provinsi Tengah	Sulawesi	<p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan sistem rujukan berbasis kompetensi;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 390 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketrampilan kader kesehatan;</li> <li>• Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>• Pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan;</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan;</li> <li>• Pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li> <li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak);</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan Kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li> <li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li> <li>• Penguatan JKN dan pendanaan Kesehatan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li> <li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li> <li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 391 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemecuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penuntasan TBC, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT) bagi masyarakat;</li><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li><li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;</li><li>• Pelaksanaan penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular TBC (TPT);</li><li>• Pelaporan kasus penyakit menular TBC (TPT) oleh fasyankes swasta;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular TBC (TPT).</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 392 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
Provinsi Tengah	Sulawesi	<p>Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan SMK menjadi pusat keunggulan;</li><li>• Pendampingan peningkatan mutu SMK;</li><li>• Pengembangan SMK menggunakan pengajaran berbasis pabrik (<i>Teaching Factory</i>);</li><li>• Pengembangan SDM dengan Pendidikan dan pelatihan kejuruan industri dan program kelas industri;</li><li>• Fasilitasi SMK agar <i>Link and Match</i> dengan industri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 393 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan;</li> <li>• <i>Upskilling dan Reskilling</i> berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi;</li> <li>• Pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja;</li> <li>• Pemanfaatan riset bidang pangan, energi, kelautan, manufaktur, bidang kesehatan, dan lain-lain;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Tadulako melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li> <li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</li> <li>• Pembangunan unit sekolah baru.</li> </ul>
Provinsi Tengah	Sulawesi	<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>
Provinsi Tengah	Sulawesi	<p>Pelestarian dan pemajuan ekosistem kebudayaan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT);</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 394 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan;</li> <li>• Penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan bagi satuan pendidikan formal;</li> <li>• Penyediaan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>• Pendaftaran tanah adat/ulayat.</li> </ul> <p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li> <li>• Pengembangan kewirausahaan.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif <i>di antaranya</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li> <li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	<p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li> <li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian;</li> <li>• Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li> <li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 395 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;</li><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 396 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitas pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 397 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran tv dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tengah	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan <i>output</i> penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*

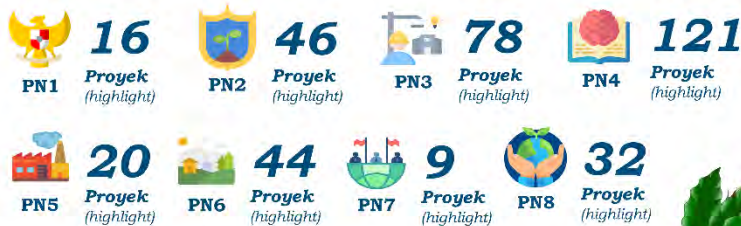


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sulawesi Selatan

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN

### 5 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah



**Program Makan Bergizi Gratis**

**9**

**Jumlah PSN**

### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Perkotaan Kecil Luwu Timur dan Tana Toraja
- ❖ Kawasan Industri (KI Takalar, KI Bantaeng, KI IHIP)
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan (Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Pinrang)
- ❖ Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla (Gunung-Rimbah-Lembah-Laut) (Barru)
- ❖ Kawasan Transmigrasi (KT) Mahalona (Luwu Timur) dan Pitu Riase (Sidenreng Rappang)
- ❖ Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan

### 38 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian ATR/BPN
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian PPN/Bappenas
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 399 -

**Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A1</b>	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, dengan <i>output</i> :
<b>A2</b>		
<b>A3</b>		
<b>A4</b>	• A1: Kota Makassar	• Pembangunan Bank Sampah Induk 1 unit di Kota Makassar;
<b>A5</b>		• Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Makassar;
<b>A6</b>	• A2: Kabupaten Maros	• Penguatan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Hasanuddin melalui Hibah Luar Negeri;
	• A3: Kabupaten Gowa	• Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui pembiayaan SBSN;
	• A4: Kabupaten Takalar	• Pengadaan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar;
	• A5: Kota Pare-Pare	• Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar - Kota Makassar;
	• A6: Kabupaten Barru	• Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar;
		• Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar;
		• Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar;
		• Penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar-Pare Pare);
		• Kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (dukungan/pendampingan KPBU);
		• Daerah yang dikuatkan tata Kelola <i>Smart City</i> -nya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 400 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan;</li> <li>• Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar;</li> <li>• Peningkatan prestasi, sarana, dan prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga (Stadion Sudiang);</li> <li>• <i>North Hub Development Project</i> Selat Makassar.</li> </ul>
<b>A7</b> <b>A8</b>	Kawasan Perkotaan Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>• A7: Kabupaten Luwu Timur (Sorowako)</li> <li>• A8: Kabupaten Tana Toraja (Makale)</li> </ul>	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan konektivitas transportasi;</li> <li>• Pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan <i>Smelter</i> Terintegrasi Tambang Sorowako di Luwu Timur.</li> </ul>
<b>A9</b> <b>A10</b> <b>A11</b>	Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Selatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• A9: Kabupaten Takalar (KI Takalar)</li> <li>• A10: Kabupaten Bantaeng (KI Bantaeng)</li> <li>• A11: Kabupaten Luwu Timur (KI Indonesia Hualu <i>Industry Park</i>)</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi;</li> <li>• Fasilitasi pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri Takalar;</li> <li>• Percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan;</li> <li>• Pengembangan investasi di kawasan ekonomi sebagai lokasi strategis;</li> <li>• Fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri;</li> <li>• Pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 401 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa dan lulusan program DI Kerja sama Industri – Kota Makassar.</li> </ul>
<b>A12</b>	Kawasan <i>Smelter</i> Terintegrasi Tambang Sorowako <ul style="list-style-type: none"> <li>• A12: Kabupaten Luwu Timur</li> </ul>	Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di <i>smelter</i> terintegrasi tambang Sorowako, Luwu Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan emisi Gas Rumah Kaca;</li> <li>• Pengkajian kebutuhan standar industri hijau;</li> <li>• Penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri;</li> <li>• Sertifikasi industri hijau;</li> <li>• Fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi;</li> <li>• Kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel;</li> <li>• Hasil <i>monitoring</i> pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri <i>smelter</i>/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi;</li> <li>• Fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi <i>smelter</i> nikel.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kabupaten Toraja Utara</li> <li>• B2: Kabupaten Luwu</li> </ul>	Pengembangan sentra perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional;</li> <li>• Hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat;</li> <li>• Pengembangan kawasan kelapa, pala, kopi dan kakao menuju hilirisasi.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 402 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B3: Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• B4: Kabupaten Pinrang</li> </ul>	
<b>C1</b>	Kawasan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila, dan rumput laut;</li> <li>• Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;</li> <li>• Penyediaan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase;</li> <li>• Pengembangan Bendungan Pamukkulu;</li> <li>• Pengembangan Bendungan Passeloreng;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C2</b>	Lumbung Pangan	
<b>C3</b>	Teluk Bone dan sekitarnya	
<b>C4</b>	• C1: Kabupaten Luwu Timur	
<b>C5</b>	• C2: Kabupaten Luwu	
<b>C6</b>	• C3: Kabupaten Luwu Utara	
<b>C7</b>	• C4: Kabupaten Wajo	
<b>C8</b>	• C5: Kabupaten Bone	
<b>C9</b>	• C6: Kabupaten Sinjai	
	• C7: Kabupaten Bulukumba	
	• C8: Kabupaten Sidenreng Rappang	
	• C9: Kabupaten Pinrang	
<b>D1</b>	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)	Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla (Gunung-Rimbah-Lembah-Laut), Kabupaten Barru, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 403 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>D1: Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla (Gunung-Rimbah-Lembah-Laut) Kabupaten Barru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li> <li>Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li> <li>Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li> <li>Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;</li> <li>Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li> <li>Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li> <li>Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li> <li>Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li> <li>Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li> </ul>
<b>D2</b> <b>D3</b>	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> <li>D2: KT Mahalona, Kabupaten Luwu Timur</li> <li>D3: KT Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona, di Kabupaten Luwu Timur, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li> <li>Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 404 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kab. Sidenreng Rappang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul>
<b>D4</b> <b>D5</b>	<p>Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D4: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan</li> <li>• D5: Kabupaten Kepulauan Selayar</li> </ul>	<p>Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana bidang kesehatan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan;</li> <li>• Pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan;</li> <li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>.</li> </ul>
<b>D6</b> <b>D7</b> <b>D8</b> <b>D9</b> <b>D10</b> <b>D11</b> <b>D12</b> <b>D13</b> <b>D14</b>	<p>Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D6: Kabupaten Luwu Timur</li> <li>• D7: Kabupaten Luwu</li> <li>• D8: Kabupaten Luwu Utara</li> <li>• D9: Kabupaten Wajo</li> </ul>	<p>Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat;</li> <li>• Preservasi ruas jalan Koridor Logistik UJUNG LAMURU - KOPPE;</li> <li>• Preservasi ruas jalan Koridor Logistik KOPPE – TACCIPI.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 405 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• D10: Kabupaten Bone</li><li>• D11: Kabupaten Sinjai</li><li>• D12: Kabupaten Bulukumba</li><li>• D13: Kabupaten Enrekang</li><li>• D14: Kota Palopo</li></ul>	
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas angkutan udara perintis penumpang di Seko, Luwu Utara;</li><li>• <i>Replacement</i> Fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai;</li><li>• Layanan angkutan perintis laut dan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara;</li><li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi;</li><li>• Pembangunan duplikasi Jembatan S. Maros A dan preservasi jalan di lintas provinsi ruas Koppe-Taccipi-BTS. Kota Watampone dan Ujung Lamuru-Koppe, ruas seseng – BTS. Sulbar dan ruas BTS. Kota Jenepono-BTS. Kota Bantaeng;</li><li>• Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 406 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bulukumba.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Bendungan Jenelata;</li> <li>• Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Selayar;</li> <li>• Pembangunan PLTB+BESS;</li> <li>• Perluasan DAK Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan;</li> <li>• Pembangunan Infrastruktur Jaringan Transmisi dan Gardu Induk;</li> <li>• Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk;</li> <li>• Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi;</li> <li>• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 407 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li></ul> <p>Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li><li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak);</li><li>• Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, dan sistem rujukan berbasis kompetensi;</li><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, urologi, dan kesehatan ibu anak;</li><li>• Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 408 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan;</li><li>• Vaksin imunisasi program;</li><li>• Pangadaan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik;</li><li>• Transformasi digital (TK);</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan.</li></ul> <p>Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> dan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat serta pembekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC (TPT), HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, <i>zoonosis</i>, dan malaria bagi masyarakat;</li><li>• Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6);</li><li>• Layanan informasi dan edukasi TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, <i>zoonosis</i>, kusta dan malaria;</li><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li><li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;</li><li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, <i>zoonosis</i>, dan Malaria);</li><li>• Pelaporan kasus penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, <i>zoonosis</i> dan malaria) oleh fasyankes swasta;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 409 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>menular prioritas (TBC, HIV/AIDS, kusta, PIMS, frambusia, <i>zoonosis</i> dan malaria);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>;</li><li>• Tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya;</li><li>• Infrastruktur air minum berbasis masyarakat;</li><li>• Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;</li><li>• Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>neonatal</i>, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;</li><li>• Kegiatan surveilans gizi dan KIA;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita;</li><li>• Kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan <i>stunting</i>;</li><li>• Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon);</li><li>• PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja;</li><li>• Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 410 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		Responsif Gender ( <i>stunting</i> /AKI, perubahan iklim, kespro); <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 411 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
Provinsi Sulawesi Selatan		Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
Provinsi Sulawesi Selatan		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 412 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan sarana dan prasarana pertanian;</li><li>• Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;</li><li>• Penyediaan alat dan mesin pertanian;</li><li>• Kawasan Tanaman Pangan dan Perkebunan;</li><li>• Sarana dan prasarana pengujian mutu kelautan dan perikanan;</li><li>• Pengembangan pangan akuatik;</li><li>• Pemenuhan penyediaan pendukung kawasan pertanian;</li><li>• Pengembangan ternak ruminansia potong.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri;</li><li>• Peningkatan kapasitas pendidik/instruktur vokasi;</li><li>• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;</li><li>• SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri;</li><li>• Pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri;</li><li>• Kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 413 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan dan peningkatan layanan pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA);</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur;</li><li>• Sertifikasi profesi bidang pertanian.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan ekosistem budaya berbasis <i>urban heritage</i> , <i>rural heritage</i> , pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival Geopark Maros Pangkep);</li><li>• Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;</li><li>• Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan;</li><li>• Desa pemajuan kebudayaan;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 414 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Data dan informasi warisan budaya;</li><li>• Koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola;</li><li>• Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst;</li><li>• Pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;</li><li>• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia;</li><li>• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup</i> Digital;</li><li>• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 415 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;</li><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai;</li><li>• Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut;</li><li>• Pengembangan ruang terbuka hijau;</li><li>• Kawasan konservasi perairan yang operasional;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 416 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana dan prasarananya;</li><li>• Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata;</li><li>• Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air;</li><li>• Penyelamatan mata air yang berperan krusial;</li><li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li><li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;</li><li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li><li>• Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;</li><li>• Pengembangan produk melalui agroforestri;</li><li>• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>• Perlindungan serta pengamanan hutan;</li><li>• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan;</li><li>• Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li><li>• Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li><li>• Sarana SAR <i>rafting boat</i>, prasarana <i>search and rescue</i> (SAR);</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 417 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKN Kapoposang;</li><li>• Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan SKKNI untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam pengembangan produk;</li><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li><li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 418 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 419 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sulawesi Tenggara

### Ringkasan Prioritas Nasional



**16**  
PN1  
Proyek  
(highlight)



**36**  
PN2  
Proyek  
(highlight)



**56**  
PN3  
Proyek  
(highlight)



**112**  
PN4  
Proyek  
(highlight)



**18**  
PN5  
Proyek  
(highlight)



**37**  
PN6  
Proyek  
(highlight)



**9**  
PN7  
Proyek  
(highlight)



**11**  
PN8  
Proyek  
(highlight)

\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan  
Bergizi Gratis

**13**

Jumlah  
PSN

### Lokasi Prioritas



- ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten Wakatobi
- ❖ Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe
- ❖ Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan Sulawesi Tenggara
- ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara
- ❖ Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara
- ❖ Kawasan Transmigrasi (KT) Asinua (Konawe), Anawua (Kolaka), Mutiara (Muna) Sulawesi Tenggara

### 36 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 420 -

**Provinsi Sulawesi Tenggara**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A1</b>	Destinasi Pariwisata Prioritas: <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: Kabupaten Wakatobi</li></ul>	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i> , dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Aksesibilitas Pariwisata;</li><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional;</li><li>• Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata;</li><li>• Jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara yang dikembangkan;</li><li>• SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja;</li><li>• Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM;</li><li>• Publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus;</li><li>• Fasilitasi akses pembiayaan digital;</li><li>• Pembiayaan <i>Startup</i>;</li><li>• Pembiayaan pasar modal;</li><li>• Pembiayaan pariwisata berkualitas;</li><li>• Rantai pasok industri pariwisata;</li><li>• Advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi;</li><li>• Promosi investasi pariwisata, promosi investasi pariwisata;</li><li>• Transformasi digital industri pariwisata;</li><li>• Penerapan pariwisata berkelanjutan;</li><li>• Pelaksanaan operasi SAR Kota Kendari.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 421 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A2</b>	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2: Kabupaten Konawe (Morosi)</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);</li> <li>• Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi;</li> <li>• Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik Landawe – Kota Maju - Asera.</li> </ul>
<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>A7</b>	Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none"> <li>• A3: Kabupaten Konawe (KI Konawe dan KI Indonesia Konawe Industrial Park)</li> <li>• A4: Kabupaten Kolaka (KI Indonesia Pomalaa <i>Industry Park</i>)</li> <li>• A5: Kabupaten Konawe Utara (KI Motui, KI ASPIRE <i>Stargate</i> dan KI Tekno Hijau Konasara)</li> <li>• A6: Kabupaten Kolaka Utara (KI Indonesia Giga <i>Industry Park</i> dan KI</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik KOLAKA - DAWI-DAWI;</li> <li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik Bts. Kab. Kolaka / Kab. Bombana - Boepinang;</li> <li>• Industri <i>smelter</i>/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya;</li> <li>• Industri <i>battery precursor</i> berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi;</li> <li>• Industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi;</li> <li>• Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri;</li> <li>• Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel;</li> <li>• Standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk;</li> <li>• Fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, yang relevan</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 422 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kolaka <i>Resources Industrial Park</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A7: Kota Kendari (KI Kendari)</li> </ul>	dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN;</li> <li>• Industri <i>special steel</i> yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi;</li> <li>• Pembangunan jalan akses KI Konawe;</li> <li>• Pembangunan/revitalisasi sentra IKM;</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel di Kab. Kolaka dan Kab. Konawe;</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan di Kab. Kolakaz.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kabupaten Kolaka Utara</li> <li>• B2: Kabupaten Kolaka Timur</li> </ul>	Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kewirausahaan;</li> <li>• Pengembangan komoditas perkebunan prioritas melalui kawasan kelapa, pala, kopi dan kakao, dan lada menuju hilirisasi.</li> </ul>
<b>B3</b>	Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none"> <li>• B3: Kota Kendari</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, dengan <i>output</i> pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - <i>eco fishing port</i> .
<b>C1</b> <b>C2</b> <b>C3</b> <b>C4</b>	Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kabupaten Bombana</li> </ul>	Pemenuhan Upaya Swasembada Pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 423 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C2: Kabupaten Kolaka Timur</li> <li>• C3: Kabupaten Konawe Selatan</li> <li>• C4: Kabupaten Konawe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pengembangan kawasan tanaman pangan;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;</li> <li>• Pengembangan Bendungan Ameroro;</li> <li>• Pengembangan Bendungan Ladongi.</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kab. Konawe, dengan <i>output</i> :
<b>D2</b>	Transmigrasi (KT)	
<b>D3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: KT Asinua, Kabupaten Konawe</li> <li>• D2: KT Anawua, Kabupaten Kolaka</li> <li>• D3: KT Mutiara, Kabupaten Muna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Anawua di Kab. Kolaka, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 424 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li></ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kab. Muna, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li><li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut;</li><li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana budi daya rumput laut;</li><li>• <i>Oceans for Prosperity LAUTRA - KKD Teluk Moramo.</i></li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri <i>electric vehicle</i> (EV) nasional;</li><li>• Fasilitasi dan pendampingan teknologi dan <i>skill-set</i> bagi IKM <i>tier 2</i> dan <i>tier 3</i> untuk transisi ke teknologi EV;</li><li>• Insentif untuk investasi SPKLU;</li><li>• Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga;</li><li>• Penyesuaian kurikulum pendidikan atau pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri;</li><li>• Perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 425 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi investasi untuk industri baterai <i>recycling</i>.</li></ul> <p>Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Sikeli;</li><li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik BOEPINANG – BAMBAAEA;</li><li>• Peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan;</li><li>• Preservasi jalan pada ruas boepinang-bambaea, ruas kolaka-dawi-dawi dan labuan – maligano;</li><li>• Peningkatan dan preservasi jalan daerah;</li><li>• Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi;</li><li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 Harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Penguatan infrastruktur TIK dan ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);</li><li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 426 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik;</li> <li>• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah;</li> <li>• Fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular dan <i>energy recovery</i>.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak;</li> <li>• Penyediaan obat, bahan, alat, serta perbekalan pencegahan dan pengendalian</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 427 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>penyakit menular (TBC (TPT), HIV/AIDS, Malaria, dan Kusta) bagi masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li><li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC;</li><li>• Penemuan aktif dan <i>Skринing mobile</i> penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria, dan Kusta);</li><li>• Pelaporan kasus (TBC, HIV/AIDS, Malaria, dan Kusta) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria, dan Kusta);</li><li>• NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin;</li><li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak);</li><li>• Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA;</li><li>• Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampunan untuk pelayanan KJSU-KIA;</li><li>• Alat kesehatan layanan kanker terpadu;</li><li>• Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis;</li><li>• Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;</li><li>• Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis;</li><li>• Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>buffer stock</i>;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 428 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;</li><li>• Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>neonatal, antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;</li><li>• Penyediaan obat dan logistik <i>Multi Drug Therapy</i> (MDT);</li><li>• Pendampingan dan pemantauan pengobatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 429 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
		C di Kab. Konawe Utara dan Kab. Muna Barat.
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 430 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul> <p>Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Sembilanbelas November Kolaka melalui pembiayaan SBSN;</li><li>• Penjaminan mutu satuan pendidikan;</li><li>• Dokumen <i>tracer study</i>;</li><li>• Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri;</li><li>• Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran;</li><li>• Standar pelatihan berbasis kompetensi;</li><li>• Guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi;</li><li>• SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan;</li><li>• Pendampingan peningkatan mutu;</li><li>• Pengembangan pengajaran berbasis pabrik;</li><li>• SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 431 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendampingan <i>link and match</i> SMK dengan industri;</li> <li>• Pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan;</li> <li>• Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>• Inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja;</li> <li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li> <li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li> <li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li> </ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>• Lembaga amil zakat dan nadzir wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan;</li> <li>• Penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 432 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);</li><li>• Penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data;</li><li>• Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);</li><li>• Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk);</li><li>• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;</li><li>• Penyediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;</li><li>• Penyediaan Program Kartu Usaha Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Pengelolaan hutan secara lestari, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;</li><li>• Pengembangan produk melalui agroforestri;</li><li>• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>• Perlindungan serta pengamanan hutan;</li><li>• Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat Penerima Akses Kelola Kawasan Hutan.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 433 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 434 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.</li></ul> <p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining Kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 435 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Peningkatan Upaya Pencegahan Mitigasi Bencana, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pembinaan penguatan kemitraan dan rantai pasok dengan Usaha Menengah dan Besar;</li><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li><li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 436 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Gorontalo

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

1

Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo
- ❖ Kawasan Tanaman Pangan dan Pertanian
- ❖ Kawasan Pengembangan Hilirisasi Kelapa
- ❖ Kecamatan Perbatasan Prioritas
- ❖ Kawasan Transmigrasi
- ❖ Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk

### 33 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan SAR Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 438 -

**Provinsi Gorontalo**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b>	Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Gorontalo</li> </ul>	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Gorontalo, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan ruang terbuka hijau;</li> <li>• Pengendalian banjir Kota Gorontalo.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b> <b>B5</b>	Kawasan Tanaman Pangan dan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kabupaten Gorontalo</li> <li>• B2: Kabupaten Gorontalo Utara</li> <li>• B3: Kabupaten Boalemo</li> <li>• B4: Kabupaten Pohuwato</li> <li>• B5: Kabupaten Bone Bolango</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Pertanian Provinsi Gorontalo, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;</li> <li>• Peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman-Tabulo dan Isimu-Paguyaman;</li> <li>• Pembangunan jalan koridor logistik;</li> <li>• Pembangunan jalan akses simpul transportasi;</li> <li>• Penyediaan layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis dan tol laut;</li> <li>• Pembangunan Bendungan Bulango Ulu;</li> <li>• Penyediaan alat dan mesin pertanian.</li> </ul>
<b>B6</b> <b>B7</b>	Kawasan Pengembangan Hilirisasi Kelapa <ul style="list-style-type: none"> <li>• B6: Kabupaten Gorontalo</li> <li>• B7: Kabupaten Gorontalo Utara</li> </ul>	Pengembangan Hilirisasi Kelapa, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sentra IKM pengolahan kelapa;</li> <li>• Pengembangan kawasan kelapa.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 439 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>D1</b>	Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kec. Gentuma Raya, Kec. Tomilito, Kec. Ponelo Kepulauan, Kec. Anggrek, Kec. Monano, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau, dan Kec. Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara</li> </ul>	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan <i>output</i> operasional dan Pemeliharaan Akses Internet.
<b>D2</b>	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D2: KT Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kab. Gorontalo Utara, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul>
<b>E1</b> <b>E2</b> <b>E3</b> <b>E4</b> <b>E5</b>	Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsb <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: Kota Gorontalo</li> <li>• E2: Kabupaten Gorontalo</li> <li>• E3: Kabupaten Bone Bolango</li> <li>• E4: Kabupaten Boalemo</li> <li>• E5: Kabupaten Pohuwato</li> </ul>	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan konservasi perairan yang operasional;</li> <li>• Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya;</li> <li>• Rekomendasi penetapan status Geopark nasional dan pengembangan pola pendanaan pengembangan Geopark;</li> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 440 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi Daerah Tampungan Air (DTA) danau secara vegetatif;</li><li>• Sarana <i>search and rescue</i> (SAR) <i>rafting boat</i>;</li><li>• Prasarana SAR;</li><li>• Pembangunan ekosistem aksi dini;</li><li>• Alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara;</li><li>• Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;</li><li>• Pengembangan produk melalui agroforestri;</li><li>• Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>• Perlindungan serta pengamanan hutan;</li><li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKD Laut Tenggara.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Pemenuhan upaya swasembada pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan input dan sarana prasarana pertanian;</li><li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li><li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li><li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li><li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li><li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 441 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Gorontalo	<p>Pengembangan permukiman yang didukung dengan pemenuhan akses peningkatan kapasitas dan jaringan listrik, serta penguatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu;</li><li>• Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM) Bone Bolango;</li><li>• Pembangunan infrastruktur gardu induk;</li><li>• OM BTS 4G/<i>Lastmile</i>.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman-Tabulo;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 442 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis.</li></ul> <p>Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li><li>• Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak;</li><li>• Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pelaksana pelayanan telemedisin;</li><li>• Pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li><li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit;</li><li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak);</li><li>• Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA;</li><li>• Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA;</li><li>• Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA;</li><li>• fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu;</li><li>• Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis;</li><li>• Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;</li><li>• Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 443 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan;</li><li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li></ul> <p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 444 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul> <p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;</li><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS dan PIMS, malaria, kusta, frambusia) bagi masyarakat;</li><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li><li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 445 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, HIV/AIDS dan PIMS, malaria, kusta, frambusia);</li><li>• Pelaporan kasus (TBC, HIV/AIDS dan PIMS, malaria, kusta, frambusia) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li><li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular prioritas (TBC, HIV/AIDS dan PIMS, malaria, kusta, frambusia);</li><li>• Ibu Hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari <i>Buffer Stock</i>;</li><li>• Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>neonatal, antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>prastunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</li><li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran;</li><li>• Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;</li><li>• Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk <i>Skrining Kesehatan</i>;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 446 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 447 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>
	Provinsi Gorontalo	<p>Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis dan pelatihan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi;</li><li>• Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 448 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penjaminan mutu satuan pendidikan;</li><li>• Dokumen hasil pelaksanaan <i>tracer study</i> pada satuan pendidikan vokasi;</li><li>• Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri;</li><li>• Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran;</li><li>• Standar pelatihan berbasis kompetensi;</li><li>• SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan;</li><li>• SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>);</li><li>• SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0;</li><li>• SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan;</li><li>• Fasilitasi Pendampingan SMK yang <i>Link and Match</i> dengan Industri;</li><li>• Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri;</li><li>• Pelatihan Vokasi di sektor strategis;</li><li>• Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV);</li><li>• Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 449 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Gorontalo	<p>Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Mustahiq</i> yang diselaraskan datanya;</li><li>• Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Prakerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);</li><li>• Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk);</li><li>• Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial;</li><li>• Penyediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan;</li><li>• Penyediaan Program Kartu Usaha Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan;</li><li>• Bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat;</li><li>• Penguatan regulasi, monitoring, dan pemutakhiran data tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD;</li><li>• Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT);</li><li>• Penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 450 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk bagi usaha kecil.</li><li>• Fasilitasi bagi usaha kecil yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima redistribusi tanah objek reforma agraria.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 451 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Gorontalo	<p>Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Gorontalo	<p>Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan <i>output</i> penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</p>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 452 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Sulawesi Barat

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 1

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan (Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah) Kawasan Transmigrasi (KT) Ulumanda (Majene), Tubbi Taramanu (Polewali Mandar), Tobadak (Mamuju Tengah), Sarudu Baras (Pasangkayu), dan Mambi Mehalaan (Mamasa)
- ❖ Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil (Mamasa)
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait Sulawesi Barat

### 31 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 453 -

**Provinsi Sulawesi Barat**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>B1</b>	Kawasan Komoditas	Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim dengan <i>output</i> :
<b>B2</b>	Unggulan Berbasis	
<b>B3</b>	Perkebunan	
<b>B4</b>	• B1: Kabupaten Polewali Mandar	
<b>B5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B2: Kabupaten Majene</li> <li>• B3: Kabupaten Mamasa</li> <li>• B4: Kabupaten Pasangkayu</li> <li>• B5: Kabupaten Mamuju Tengah</li> </ul>	
<b>D1</b>	Kawasan Transmigrasi (KT)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ulumanda di Kab. Majene, dengan <i>output</i> :
<b>D2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: KT Ulumanda, Kabupaten Majene</li> <li>• D2: KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar</li> <li>• D3: KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah</li> <li>• D4: KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan kakao, kopi, dan kelapa sebagai komoditas perkebunan prioritas;</li> <li>• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>• Penyediaan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pembangunan Bendungan Budong-Budong;</li> <li>• Pendampingan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor;</li> <li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik MAMBI – MALABO.</li> </ul>
<b>D3</b>		• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;
<b>D4</b>		• Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.
<b>D5</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu di Kab. Polewali Mandar, dengan <i>output</i>:</li> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 454 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"><li>D5: KT Mambi Mehalaan, Kabupaten Mamasa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li><li>Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi;</li><li>Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li><li>Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li></ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kab. Mamuju Tengah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi;</li><li>Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li><li>Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li></ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kab. Pasangkayu, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li><li>Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li><li>Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi;</li><li>Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li></ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mambi Mehalaan di Kab. Mamasa, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 455 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jembatan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pengembangan sistem drainase di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian bantuan peralatan pascapanen di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi;</li> </ul>
<b>E1</b>	Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: Kabupaten Mamuju</li> </ul>	Pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan konservasi perairan yang operasional;</li> <li>• Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya;</li> <li>• Sarana SAR <i>rafting boat</i>;</li> <li>• Prasarana <i>search and rescue</i> (SAR);</li> <li>• Pembangunan ekosistem aksi dini;</li> <li>• Penataan bangunan kawasan rawan bencana.</li> </ul>
<b>E2</b>	Kawasan Rawan	Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Makassar Strait, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan pelayanan informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur;</li> <li>• Penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana;</li> <li>• Terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat;</li> </ul>
<b>E3</b>	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait	
<b>E4</b>	Sulawesi Barat	
<b>E5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E2: Kabupaten Majene</li> <li>• E3: Kabupaten Polewali Mandar</li> <li>• E4: Kabupaten Mamuju</li> <li>• E5: Kabupaten Pasangkayu</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 456 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terpasangnya instrumentasi peringatan dini;</li><li>• Persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Pemenuhan upaya swasembada pangan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li><li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li><li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li><li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li><li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li><li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Simulasi penanggulangan bencana;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemulihan lahan gambut di areal penggunaan lainnya;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 457 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Program Gambut Lestari;</li><li>• Program Desa Mandiri Peduli Gambut;</li><li>• Penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut;</li><li>• Penyediaan data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Pengembangan industri mesin dan perlengkapan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan industri alat mesin pertanian yang terfasilitasi dalam rangka penguatan mekanisasi pertanian nasional;</li><li>• Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang perindustrian sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 458 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik KAROSSA - TOPOYO;</li><li>• Preservasi Jalan Koridor Logistik MAMASA - TABANG (BTS. PROV. SULSEL);</li><li>• Pelaksanaan kampanye/sosialisasi/promosi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;</li><li>• Pemeliharaan perlengkapan jalan;</li><li>• Daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;</li><li>• Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional;</li><li>• Layanan angkutan tol laut prioritas nasional;</li><li>• Peningkatan pasokan tenaga listrik;</li><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li><li>• Preservasi jalan BTS. Kab. Mamuju-Tameroddo dan jalan Surumana (BTS. Prov. Sulteng)-Pasangkayu, Akses Bandar Udara Tamba Padang (mamuju), Akses Pelabuhan Belang-Belang;</li><li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 Harga dan/atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Majene.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 459 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu, serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah;</li><li>• Pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik;</li><li>• Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);</li><li>• Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Pembinaan pada Fasilitator/<i>Enabler Digital</i> PMSE;</li><li>• Pelaksanaan pemantauan/<i>monitoring</i>;</li><li>• Bimbingan teknis pada pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE;</li><li>• Peningkatan literasi masyarakat di bidang digital;</li><li>• Pembangunan transmisi;</li><li>• Pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 460 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dan desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan permukiman kumuh terpadu.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Penguatan sistem tata kelola pendidikan vokasi (SMA, SMK dan Politeknik) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian dan perkebunan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan peningkatan mutu pada sekolah menengah atas (SMA);</li><li>• Pendampingan dalam rangka menuntaskan kekerasan seksual;</li><li>• Penyediaan prasarana SMAKN;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan;</li><li>• Pendampingan peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (<i>Teaching Factory</i>) di SMK;</li><li>• Pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan;</li><li>• Pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja;</li><li>• Pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 461 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan persiapan program magang luar negeri;</li><li>• Fasilitasi sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja;</li><li>• Pengembangan bidang <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Math</i> (STEAM);</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas di seluruh jenjang yang mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas SPA serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li><li>• Pelatihan layanan KJSU-KIA (kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 462 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana;</li><li>• Pemenuhan alat kesehatan;</li><li>• Peningkatan ketrampilan kader kesehatan;</li><li>• Pemantauan keaktifan posyandu;</li><li>• Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat;</li><li>• Akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis;</li><li>• Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan;</li><li>• Pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah;</li><li>• Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li><li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana dan layanan RS;</li><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 463 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>prevention and acceleration of stunting reduction with <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Health/non-health workers whose capacity is improved;</li><li>• Provision of supplementary feeding (PMT) for pregnant women and malnourished children;</li><li>• Meeting the coverage of intervention services according to the needs of the target group (such as increasing exclusive breastfeeding, immunization, early detection through growth monitoring, <i>neonatal, antenatal care (ANC)</i>, implementation for pregnant women and malnourished children <i>pre-stunting</i>, meeting water intake, sanitation, food security, counseling, and others);</li><li>• Increasing convergence of services for the target group;</li><li>• Provision of drugs, materials, tools, and supplies for prevention and control of communicable diseases (TBC (TPT), HIV/AIDS, malaria, and others) for the community;</li><li>• TB control in the workplace;</li><li>• Counseling of institutions in clinical TB vaccine trials;</li><li>• Active and <i>Skrining mobile</i> detection of communicable diseases (TBC (TPT), HIV/AIDS, malaria, and others);</li><li>• Reporting of communicable disease cases (TBC (TPT), HIV/AIDS, malaria, and others) by private health providers;</li><li>• Training of health workers in detection and control</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 464 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>penyakit menular (TBC (TPT), HIV/AIDS, kusta, dan malaria);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat dan logistik MDT;</li><li>• Pendampingan dan pemantauan pengobatan;</li><li>• Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional;</li><li>• Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 465 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 466 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul> <p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</li><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 467 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;</li><li>• Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak termasuk penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li><li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 468 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Sulawesi Barat	<p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 469 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Maluku

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

### 2

### Jumlah PSN

### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Pariwisata Banda Neira – Kab. Maluku Tengah
- ❖ Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) – Kab. Kepulauan Tanimbar
- ❖ Kawasan Perkotaan (Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira) – Kab. Maluku Tengah
- ❖ Kawasan Perkotaan (Kawasan Perkotaan Sedang Ambon) – Kota Ambon
- ❖ Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster – Kota Ambon, Kota Tual
- ❖ Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster – Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan
- ❖ Kawasan Swasembada Air – Kab. Buru
- ❖ Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Aru, Kota Tual
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (Kawasan Agropolitasi Berbasis Komoditas Unggulan Padi) – Kab. Buru
- ❖ Kawasan Konservasi KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda – Kab. Maluku Tengah
- ❖ Kawasan Konservasi KKD Pulau Kei Kecil – Kab. Maluku Tenggara
- ❖ Kawasan Konservasi KK Perairan Buano – Kab. Seram Bagian Barat
- ❖ Kawasan Konservasi Kepulauan Aru bagian Tenggara – Kab. Kepulauan Aru
- ❖ Kawasan Konservasi KK Perairan Kepulauan Lease – Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah

### 32 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Informasi Geospasial
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 470 -

**Provinsi Maluku**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A1</b>	<p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: Kawasan Pariwisata Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)</li></ul>	<p>Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan desa wisata;</li><li>• Pengembangan atraksi wisata budaya, penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan;</li><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (<i>tourism map</i>) yang berkualitas;</li><li>• Pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah;</li><li>• Penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas;</li><li>• Pembangunan kios cendera mata;</li><li>• Pengembangan pasar tematik wisata;</li><li>• Penyediaan layanan kesehatan wisatawan;</li><li>• Pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata;</li><li>• Penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat;</li><li>• Promosi terpadu secara nasional dan internasional;</li><li>• Pembangunan jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah;</li><li>• Peningkatan akses pembiayaan, literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>A2: Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembentukan dan pembinaan BUM Desa serta koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan.</li></ul> Penyiapan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela dan kawasan sekitarnya secara terintegrasi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>Penyiapan pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela;</li><li>Penyusunan masterplan penataan dan pengembangan kawasan sekitar Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela;</li><li>Penetapan wilayah keprospekan migas;</li><li>Penyiapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas.</li></ul>
<b>A3</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>A3: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)</li></ul>	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>Penetapan RDTR dan RTBL;</li><li>Penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk penyediaan <i>wayfinding</i>, pembangunan <i>promenade</i> sepanjang pantai, pengembangan <i>shared-street</i> dan <i>street furniture</i>;</li><li>Manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan;</li><li>Pemanfaatan cagar budaya (<i>adaptive reuse</i>) sesuai <i>branding</i> kawasan;</li><li>Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, serta media lainnya di dalam dan luar negeri;</li><li>Pembangunan drainase;</li><li>Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>Perluasan layanan penyiaran digital;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 472 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan fasilitas asrama pendidikan;</li><li>• Penyediaan dan peningkatan layanan; pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;</li><li>• Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang transparan dan akuntabel;</li><li>• Penetapan Kawasan Cagar Budaya lingkup DTW Budaya Desa Dwiwarna dan Nusantara;</li><li>• Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Banda;</li><li>• Penyimpanan dan pendokumentasian cagar budaya (Peringkat Nasional) sesuai dengan standar metode, teknik, dan peralatan yang ditetapkan: Perlindungan Cagar Budaya;</li><li>• Penetapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Banda (Peringkat Nasional);</li><li>• Perbaikan kerusakan cagar budaya (Peringkat Nasional) sesuai dengan kaidah preservasi cagar budaya;</li><li>• Penetapan ODCB Kabupaten, Provinsi, dan Nasional;</li><li>• Penetapan Lanskap Sejarah dan Bahari yang disepakati oleh Pemerintah daerah, Kementerian Kebudayaan, serta UNESCO serta institusi terkait lainnya;</li><li>• Penyusunan narasi tentang sejarah dan budaya Banda terkait dengan Jalur Rempah Nusantara.</li></ul>
<b>A4</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A4: Kawasan Perkotaan Sedang</li></ul>	Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Ambon dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan infrastruktur TIK;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 473 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Ambon (Kota Ambon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola sampah;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Pattimura melalui pembiayaan SBSN.</li> </ul>
<b>B1</b>	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster)	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster dengan <i>output</i> :
<b>B2</b>		
<b>B3</b>		
<b>B4</b>		
<b>B5</b>		
<b>B6</b>		
	Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kota Ambon</li> <li>• B2: Kota Tual</li> </ul> Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• B3: Kab. Seram Bagian Barat</li> <li>• B4: Kab. Maluku Tengah</li> <li>• B5: Kab. Maluku Tenggara</li> <li>• B6: Kab. Kepulauan Aru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li> <li>• Pengembangan kewirausahaan.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 474 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Maluku	<p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Jalan Kepulauan Aru Popjetur – Batu Goyang;</li><li>• Pembangunan Jalan Trans Seram-Jalan Werinama - Kota Baru - Air Nanang;</li><li>• Peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Mahaleta, Pelabuhan Namrole;</li><li>• Penyelenggaraan layanan angkutan penyeberangan perintis;</li><li>• Pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Langgur, Bandara Dobo;</li><li>• Pengembangan <i>seaplane</i>;</li><li>• Pengembangan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi;</li><li>• Perluasan akses internet cepat;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li><li>• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Maluku pada Kab. Seram Bagian Barat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 475 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Ambon (perikanan)</li> <li>• Kota Tual (perikanan)</li> <li>• Kab. Maluku Tengah (pariwisata)</li> <li>• Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jalan menuju fasilitas pendidikan;</li> <li>• Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li> <li>• SMK yang menyiarkan pengajaran berbasis pabrik (<i>Teaching Factory</i>);</li> <li>• Revitalisasi fasilitas pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri;</li> <li>• Pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan;</li> <li>• Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Iptekin.</li> </ul>
<b>C3</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C3: Kab. Maluku Tengah*</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</li> </ul>	<p>Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan dan pangan akuatik/ <i>blue food</i> berbasis rumput laut dan pangan hewani dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan <i>input</i> dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penyaluran bibit rumput laut;</li> <li>• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;</li> <li>• Penyediaan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>• Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 476 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C2</b> <b>C4</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C2: Kota Ambon*</li> <li>• C4: Kab. Seram Bagian Barat*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Seram Bagian Timur**</li> <li>• Kab. Kepulauan Aru**</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pembangkit listrik tenaga minyak (PLTM);</li> <li>• Pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm);</li> <li>• Pembangunan sistem distribusi ketenagalistrikan;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Ambon MPP Sambelia;</li> <li>• Pembangunan PLTS + BESS Bula;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Namrole;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Seram 2;</li> <li>• Pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik;</li> <li>• Pembangunan infrastruktur gardu induk.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 477 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	listrik non PLN dan bukan listrik	
<b>C1</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Buru*</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi</p>	<p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil dengan <i>output</i> pembangunan Bendungan Way Apu.</p>
<b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b> <b>D4</b> <b>D5</b>	<p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKS dan Wilayah Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: PKS Saumlaki, serta Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara (Kab. Kepulauan Tanimbar)</li> <li>• D2: PKS Ilwaki (Kab. Maluku Barat Daya)</li> </ul> <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Kab. Maluku Tenggara)</li> <li>• D4: Kec. Aru Tengah Timur, Aru</li> </ul>	<p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan pemeliharaan akses internet;</li> <li>• Penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi;</li> <li>• Layanan konektivitas angkutan keperintisan;</li> <li>• Peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo di Kab. Kepulauan Aru;</li> <li>• Materi teknis dan RPerpres Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;</li> <li>• Fasilitasi dan koordinasi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kawasan perbatasan;</li> <li>• Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 478 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir (Kab. Kepulauan Aru)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• D5: Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual)</li></ul>	
<b>D6</b>	<p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• D6: Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi Kabupaten Buru</li></ul>	<p>Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi Kabupaten Buru dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li><li>• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li><li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li><li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;</li><li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li><li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li><li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li><li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li><li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 479 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Buru Selatan</li> <li>• Kab. Kepulauan Aru</li> <li>• Kab. Maluku Barat Daya (PKSN Ilwaki)</li> <li>• Kab. Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki)</li> </ul> <p>Penguatan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Maluku Tenggara</li> <li>• Kota Tual</li> </ul>	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan guru dikmen dan diksus;</li> <li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li> <li>• Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan SMK;</li> <li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK);</li> <li>• Makanan bergizi seimbang bagi peserta didik;</li> <li>• Pembinaan afirmasi pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li> <li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li> <li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li> <li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li> <li>• Peningkatan literasi digital di antaranya melalui penyediaan perpustakaan dan modul <i>e-learning</i>;</li> <li>• Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan;</li> <li>• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 480 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru.</li></ul>
	Provinsi Maluku	<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan output talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>
	Provinsi Maluku	<p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• Fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal;</li><li>• Monitoring dan evaluasi pelestarian cagar budaya, aset sejarah dan budaya;</li><li>• Penyelenggaraan <i>event</i> diplomasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK);</li><li>• Pelestarian objek diduga cagar budaya (ODCB) dan OPK;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 481 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li> <li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li> <li>• <i>Event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li> </ul> <p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan promosi industri gim nasional;</li> <li>• Fasilitasi inkubasi dan akselerasi <i>Startup</i> gim Indonesia;</li> <li>• Pembinaan/Pendampingan melalui inkubasi <i>Startup</i> digital;</li> <li>• Pelatihan talenta digital yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Buru</li> <li>• Kab. Buru Selatan</li> <li>• Kab. Seram Bagian Timur</li> <li>• Kab. Kepulauan Aru (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li> <li>• Kab. Maluku Barat Daya (PKSN Ilwaki)</li> <li>• Kab. Kepulauan Tanimbar (Kecamatan Perbatasan Prioritas dan PKSN Saumlaki)</li> <li>• Kota Tual (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li> </ul>	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan, di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), swasembada air dengan output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan, dan posyandu;</li> <li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li> <li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li> <li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;</li> <li>• Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 482 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota</p>	<p>elayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>;</li> <li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak dan implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li> <li>• Penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting;</li> <li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pusat, Puskesmas, dan RSUD;</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro.</li> </ul> <p>Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe C di Kota Tual, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru;</li> <li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li> <li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	<p>Provinsi Maluku</p>	<p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 483 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li> <li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul>
	<p>Penanganan Penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Maluku Tenggara</li> <li>• Kab. Maluku Tengah</li> <li>• Kab. Kepulauan Aru</li> <li>• Kota Tual</li> </ul>	<p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, rabies) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> </ul>
	<p>Penanganan Penyakit Malaria: 8 kabupaten di Provinsi Maluku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, rabies);</li> <li>• Pelaporan kasus (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, rabies) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 484 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Penanganan Penyakit ISPA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Maluku Tengah</li> <li>• Kab. Maluku Barat Daya</li> <li>• Kota Ambon</li> <li>• Kota Tual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, rabies);</li> <li>• Penyediaan obat hewan;</li> <li>• Vaksinasi hewan.</li> </ul>
	Penanganan Penyakit pneumonia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Buru</li> <li>• Kab. Kepulauan Aru</li> <li>• Kab. Seram Bagian Timur</li> <li>• Kab. Maluku Barat Daya</li> </ul>	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li> <li>• Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa;</li> <li>• Penguatan KIE;</li> <li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>• Penerapan &amp; penegakan KTR;</li> <li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan;</li> </ul>
	Penanganan Penyakit rabies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Kepulauan Tanimbar</li> <li>• Kab. Maluku Tengah</li> <li>• Kab. Seram Bagian Barat</li> <li>• Kab. Maluku Barat Daya</li> <li>• Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat.</li> </ul>
	Penanganan penyakit kusta:	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 485 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Maluku</li> </ul>	
	Provinsi Maluku	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</li> <li>• Pengembangan sistem dan tata kelola;</li> <li>• Pengembangan sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya;</li> <li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi;</li> <li>• Kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li> <li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i>;</li> <li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li> </ul>
	Provinsi Maluku	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 486 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi;</li><li>• Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan surveilans;</li><li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li><li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li><li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li><li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 487 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Maluku	Penyehatan lingkungan dengan output penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPP 714 (perbatasan perairan dengan Timor Leste)</li> <li>• WPP 715 (perbatasan perairan dengan Australia)</li> </ul>	<p>Peningkatan kerjasama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik IUU <i>Fishing</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia;</li> <li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan.</li> </ul>
<b>E1</b>	Kawasan Konservasi:	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> :
<b>E2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: KKN Laut Banda, TWA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati;</li> <li>• Fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat;</li> <li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKN Laut Banda, KKN Aru Tenggara, KKD Pulau Kei Kecil, KKD Kep. Babar, KKD Wetar, KKD Buru Selatan, KKD Buru.</li> </ul>
<b>E3</b>	Gunung Api Banda, KK	
<b>E4</b>	Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun (Kab. Maluku Tengah)	
<b>E5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E2: KKD Pulau Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara)</li> <li>• E3: KK Perairan Buano (Kab. Seram Bagian Barat)</li> <li>• E4: KK Kepulauan Aru bagian Tenggara (Kab. Kepulauan Aru)</li> <li>• E5: KK Perairan Kepulauan Lease (Kota Ambon dan</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 488 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kab. Maluku Tengah)  Provinsi Maluku	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li><li>• Rehabilitasi hutan dan lahan;</li><li>• Perlindungan jalur jelajah satwa penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 489 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul> <p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemajuan Kerangka Regulasi dan Kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam Menjaga Keberagaman dan Pemenuhan HAM Perempuan;</li><li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah Daerah melalui Penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT Diklat Perancang PUU yang Berperspektif HAM;</li><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 490 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Maluku	<p>Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li><li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</li></ul>
	Provinsi Maluku	<p>Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 491 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Maluku	<p>Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi (Iptekin) dalam Pembangunan Nasional, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas SDM Iptekin;</li><li>• Penguatan infrastruktur Iptekin strategis;</li><li>• Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin;</li><li>• Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);</li><li>• Penguatan kapasitas <i>Science Techno Park</i> (STP);</li><li>• <i>Pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di daerah;</li><li>• <i>Pilot project hub</i> ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas;</li><li>• <i>Pilot project hub</i> prioritas tematik Iptekin di BRIN;</li><li>• Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas.</li></ul>
	Provinsi Maluku	<p>Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi jalan dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 492 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>
	Provinsi Maluku	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif di antaranya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil (kegiatan Daring se-Indonesia);</li><li>• Fasilitasi bagi Usaha Kecil yang Mendukung Makan Bergizi Gratis (kegiatan Daring se-Indonesia).</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 493 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Maluku Utara

### Ringkasan Prioritas Nasional



**16**

PN1  
Proyek  
(highlight)



**55**

PN2  
Proyek  
(highlight)



**90**

PN3  
Proyek  
(highlight)



**145**

PN4  
Proyek  
(highlight)



**20**

PN5  
Proyek  
(highlight)



**38**

PN6  
Proyek  
(highlight)



**28**

PN7  
Proyek  
(highlight)



**23**

PN8  
Proyek  
(highlight)

\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

**5**

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas

**20**

- ❖ Kawasan Industri Bali – Kab. Halmahera Timur
- ❖ Kawasan Industri Weda Bay – Kab. Halmahera Tengah
- ❖ Kawasan Industri Pulau Obi – Kab. Halmahera Selatan
- ❖ Kawasan Pariwisata DPP Morotai – Kab. Pulau Morotai
- ❖ Kawasan Perkotaan (Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba) – Kab. Pulau Morotai
- ❖ Kawasan Perkotaan Weda – Kab. Halmahera Tengah
- ❖ Kawasan Perkotaan (Kota Sofifi) – Kota Tidore Kepulauan
- ❖ Kawasan Ekonomi Khusus Morotai – Kab. Pulau Morotai
- ❖ Sentra Industri Berbasis Komoditas Kelapa – Kab. Halmahera Barat
- ❖ Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa – Kab. Halmahera Selatan
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Barat
- ❖ Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kab. Pulau Morotai,
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur
- ❖ Kawasan Transmigrasi – Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Pulau Morotai
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas (Kawasan Perdesaan Agropolitan) – Kab. Halmahera Barat
- ❖ Kawasan Konservasi TN Aketejawe Lolobata – Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan
- ❖ Kawasan Konservasi SM Goa Bukimoruru – Kab. Halmahera Tengah
- ❖ Kawasan Konservasi CA Pulau Obi – Kab. Halmahera Selatan
- ❖ Kawasan Konservasi KKD Pulau Mare – Kota Tidore Kepulauan

### 38 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Badan Riset dan Inovasi Nasional
- ❖ Badan Pengawas Obat dan Makanan
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- ❖ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 494 -

Provinsi Maluku Utara

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan:	Optimalisasi pusat pertumbuhan
A2	• A1: KI Buli, Kab. Halmahera Timur	eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, dengan <i>output</i> :
A3	• A2: KI Weda Bay, Kab. Halmahera Tengah	• Percepatan penerapan sistem perizinan terpadu;
	• A3: KI Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan	• Preservasi jalan dan jembatan mendukung Kawasan Industri IWIP (Weda – Sagea);
		• Pengembangan konektivitas antarprovinsi;
		• Pembangunan IPA Kap. 30 liter/detik SPAM Pulau Kayoa Kab. Halmahera Selatan;
		• Pemerataan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;
		• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik dan jaringan ketenagalistrikan;
		• Pembangunan sarana pemadam kebakaran;
		• Pengembangan fasilitas kesehatan primer;
		• Pengembangan <i>smelter</i> pengolahan dan pemurnian nikel, serta hasil pengolahan sisa industri;
		• Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel terintegrasi dengan penambangan serta kawasan industri dalam rangka pengembangan EV <i>battery</i> nasional di Halmahera Timur;
		• Penyelesaian <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) bidang jasa dan kawasan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
<b>A4</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>A4: DPP Morotai, Kab. Pulau Morotai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan;</li><li>• Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal;</li><li>• Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri;</li><li>• Fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri;</li><li>• Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan;</li><li>• Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri;</li><li>• Pengembangan UMKM;</li><li>• Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang;</li><li>• Pelatihan vokasi industri;</li><li>• Fasilitas pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri;</li><li>• Percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan <i>enhanced</i> NDC dan menuju <i>net zero economy</i>;</li><li>• Pembangunan infrastruktur untuk mendukung dekarbonisasi industri.</li></ul> Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting di DPP Morotai, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 496 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	(termasuk PKSN Daruba)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi Jembatan Sofi – Wayabula untuk mendukung logistik DPP Morotai;</li><li>• Penataan kawasan koridor Daname dan Nunuhu;</li><li>• Pelaksanaan kegiatan (<i>event</i>) festival Pulau Morotai;</li><li>• Pemerataan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata;</li><li>• Manajemen kunjungan wisata;</li><li>• Kerjasama pariwisata dengan negara-negara Pasifik dan Mikronesia;</li><li>• Promosi investasi dan promosi destinasi terpadu;</li><li>• Kerjasama pariwisata dengan negara-negara Pasifik dan Mikronesia;</li><li>• Promosi investasi dan promosi destinasi terpadu;</li><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa;</li><li>• Peningkatan akses pembiayaan modal;</li><li>• Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang;</li><li>• Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa;</li><li>• Penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 497 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A5</b>	<p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A5: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)</li></ul>	<p>Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran;</li><li>Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);</li><li>Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai - Jalan Sopi - Wayabula 2.</li></ul>
<b>A6</b>	<p>Kawasan Pertumbuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A6: Kawasan Perkotaan Industri Weda (Kab. Halmahera Tengah)</li></ul>	<p>Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Weda dan penataan kawasan perkotaan di sekitar KI Weda Bay dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan konsolidasi lahan;</li><li>Pengembangan fasilitas kesehatan primer;</li><li>Pembangunan RTH dan ruang terbuka publik;</li><li>Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);</li><li>Pembangunan jalan akses simpul transportasi;</li><li>Preservasi Jalan Akses Kawasan Industri Weda - Mafa;</li><li>Perlindungan dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat, serta penetapan hutan adat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 498 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A7</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A7: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)</li></ul>	Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan bangunan gedung kantor (Polda, Kanwil BPN, BPTD, KOREM TNI-AD, LANAL TNI-AL, Kejaksaan Tinggi, BPKP, PUPR);</li><li>• Penyusunan masterplan penataan dan pengembangan Kota Sofifi;</li><li>• Pengembangan kawasan perdagangan;</li><li>• Pembangunan dermaga polisi air.</li></ul>
<b>A8</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A8: KEK Morotai, Kab. Pulau Morotai</li></ul>	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);</li><li>• Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK;</li><li>• Peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK;</li><li>• Pelayanan investasi administrator KEK tipe A.</li></ul>
<b>B1</b> <b>B2</b>	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kelapa) Sentra Industri <ul style="list-style-type: none"><li>• B1: Kab. Halmahera Barat</li></ul> Sentra Produksi <ul style="list-style-type: none"><li>• B2: Kab. Halmahera Selatan</li></ul>	Penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas perkebunan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan ekspor dan pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dan koperasi berbasis komoditas;</li><li>• Pengembangan industri produk turunan kelapa;</li><li>• Penguatan inkubator bisnis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 499 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kerja sama perdagangan internasional;</li><li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li><li>• Peningkatan kualitas SDM;</li><li>• Pendampingan pengembangan industri;</li><li>• Peningkatan gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i> (WMS);</li><li>• Investasi dan peningkatan akses pembiayaan modal;</li><li>• Pemberian redistribusi tanah;</li><li>• Pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima redistribusi tanah;</li><li>• Peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian <i>matching fund</i> (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perkebunan;</li><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pemberian fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil;</li><li>• Pengembangan kewirausahaan;</li><li>• Pengembangan kawasan kelapa komoditas prioritas hilirisasi.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi jalan Pulau Morotai (ruas Sopi - Wayabula - Daruba dan ruas Daeo/Sangowo - Bere-Bere);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 500 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan fasilitas pokok Pelabuhan Matui;</li> <li>• Penyelenggaraan layanan angkutan penyeberangan perintis;</li> <li>• Optimalisasi layanan bandara termasuk penyediaan penerbangan perintis;</li> <li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi;</li> <li>• Perluasan akses internet cepat;</li> <li>• Pembangunan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga dan atau Pengawasan Operasional BBM 1 Harga, Provinsi Maluku Utara pada Kota Ternate, Kab. Halmahera Tengah, dan Kab. Kepulauan Sula.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Halmahera Barat (perkebunan)</li> <li>• Kab. Halmahera Tengah (industri dan pertambangan)</li> <li>• Kab. Halmahera Selatan (industri dan pertambangan)</li> <li>• Kab. Halmahera Timur (industri dan pertambangan)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan menuju fasilitas pendidikan; perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li> <li>• Revitalisasi fasilitas pendidikan;</li> <li>• Pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 501 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Pulau Morotai (pariwisata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sarana dan prasarana Universitas Khairun melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas.</li> </ul>
<b>C1</b> <b>C2</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C1: Kab. Halmahera Utara* (padi)</li> <li>C2: Kab. Halmahera Timur*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Kepulauan Sula** (ubi)</li> <li>Kab. Pulau Taliabu** (ubi dan jagung)</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<p>Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan dan pangan hewani, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk;</li> <li>Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;</li> <li>Penyediaan alat dan mesin pertanian;</li> <li>Penguatan promosi pangan B2SA mendukung kawasan rentan;</li> <li>Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>Penguatan dan pelayanan dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 502 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>C1</b> <b>C3</b> <b>C4</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Halmahera Utara*</li> <li>• C3: Kab. Halmahera Selatan*</li> <li>• C4: Kab. Halmahera Barat*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Pulau Taliabu**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>***) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non-PLN dan bukan listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul> <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan PLTMG Bacan;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Sofifi;</li> <li>• Pembangunan PLTS + BESS Tobelo;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Morotai;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Sanana;</li> <li>• Pembangunan PLTMG Ternate 2;</li> <li>• Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan ketenagalistrikan.</li> </ul>
<b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b>	<p>Kawasan Afirmasi</p> <p>Kawasan Perbatasan</p> <p>PKSN dan Wilayah Pendukung</p>	<p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan pemeliharaan akses internet;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 503 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>D1: PKSN Daruba, serta Kec. Morotai Utara (Kab. Pulau Morotai)</li> </ul> <p>Kecamatan Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D2: Kec. Patani Utara (Kab. Halmahera Tengah)</li> <li>D3: Kec. Maba Utara (Kab. Halmahera Timur)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi;</li> <li>Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar.</li> </ul>
<b>D4</b>	Kawasan Afirmasi -	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh di Kab. Halmahera Tengah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>Pengembangan jalan di kawasan transmigrasi;</li> <li>Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi;</li> <li>Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi;</li> <li>Pembinaan sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi.</li> </ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pulau Bacan di Kab. Halmahera Selatan, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.</p> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Patlean di Kab. Halmahera Timur, dengan <i>output</i>:</p>
<b>D5</b>	Kawasan Transmigrasi (KT)	
<b>D6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D4: KT Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah)</li> </ul>	
<b>D7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D5: KT Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan)</li> <li>D6: KT Patlean (Kab. Halmahera Timur)</li> <li>D7: KT Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai)</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 504 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li><li>• Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li></ul> <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kab. Pulau Morotai, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.</p>
<b>D8</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"><li>• D8: Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat</li></ul>	Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li><li>• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li><li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li><li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan;</li><li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li><li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li><li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li><li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li><li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 505 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	<p>Penguatan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Pulau Taliabu</li><li>• Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li></ul>	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li></ul>
	<p>Penguatan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Halmahera Selatan</li><li>• Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li><li>• Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan SMK;</li><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK);</li><li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah;</li><li>• Pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya;</li><li>• Peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 506 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP);</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan output talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Maluku Utara	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• <i>Event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 507 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Kepulauan Sula</li> <li>• Kab. Pulau Taliabu</li> <li>• Kab. Halmahera Selatan</li> <li>• Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li> <li>• Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li> <li>• Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas)</li> </ul> <p>Layanan Unggulan RS: seluruh kab/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li> </ul> <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan, dan posyandu;</li> <li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li> <li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di RS daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;</li> <li>• Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>;</li> <li>• Peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>;</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD;</li> <li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li> <li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 508 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana RS daerah tipe D atau D pratama menjadi setara tipe C di Kab. Halmahera Tengah;</li><li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;</li><li>• Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 509 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul>
	Penanganan Penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Halmahera Utara</li> <li>• Kab. Halmahera Timur</li> </ul>	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, kusta, dan rabies) bagi masyarakat;</li> </ul>
	Penanganan Penyakit Malaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Halmahera Selatan</li> <li>• Kab. Halmahera Utara</li> <li>• Kab. Halmahera Timur</li> <li>• Kab. Pulau Taliabu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, kusta, dan rabies);</li> <li>• Pelaporan kasus (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, kusta, dan rabies) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> </ul>
	Penanganan Penyakit ISPA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Halmahera Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, kusta, dan rabies);</li> <li>• Pembinaan Program P2 TBC di Daerah (LP-6);</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 510 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Halmahera Tengah</li><li>• Kab. Halmahera Utara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat hewan;</li><li>• Vaksinasi hewan.</li></ul>
	<p>Penanganan Penyakit pneumonia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Halmahera Barat</li><li>• Kab. Halmahera Utara</li><li>• Kota Ternate</li><li>• Kota Tidore Kepulauan</li></ul>	
	<p>Penanganan Penyakit Rabies:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Halmahera Barat</li><li>• Kab. Halmahera Tengah</li><li>• Kab. Halmahera Selatan</li><li>• Kab. Halmahera Utara</li><li>• Kab. Halmahera Timur</li><li>• Kab. Pulau Morotai</li><li>• Kota Ternate</li></ul>	
	<p>Penanganan Penyakit Kusta:</p> <p>Provinsi Maluku Utara</p>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 511 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Maluku Utara	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li><li>• Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa;</li><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan &amp; penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi ketentuan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan;</li><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li><li>• Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</li><li>• Penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan infrastruktur SPAL;</li><li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi;</li><li>• Kampanye pencegahan <i>Stunting</i> melalui berbagai media;</li><li>• Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li><li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li><li>• Penguatan puskesmas, gedung pelayanan Kesehatan ibu dan anak;</li><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li><li>• Penguatan implementasi program KB;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, ANC, tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 513 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan <i>output</i> peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.</p>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara;</li><li>• Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;</li><li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan <i>farmakovigilans</i>;</li><li>• Penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Penyehatan lingkungan dengan output penguatan surveilans kualitas air minum</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 514 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPP 716 (perbatasan perairan dengan Filipina)</li> <li>• WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> </ul>	<p>Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerjasama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama serta pemberantasan praktik IUU <i>Fishing</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan;</li> <li>• Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Palau;</li> <li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan.</li> </ul>
<b>E1</b>	Kawasan Konservasi:	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> :
<b>E2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan)</li> <li>• E2: Suaka Margasatwa Goa Bukimoruru (Kab. Halmahera Tengah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>• Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut);</li> </ul>
<b>E3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E3: Cagar Alam Pulau Obi (Kab. Halmahera Selatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kasus tindak pidana LHK P21;</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> </ul>
<b>E4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E4: KKD Pulau Mare (Kota Tidore Kepulauan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 515 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan;</li><li>• Inventarisasi keterancam spesies dan konservasi biota yang terancam punah;</li><li>• Penyediaan fasilitas penelitian;</li><li>• Pengembangan dan penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon;</li><li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li><li>• Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);</li><li>• Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati;</li><li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA – KKD Pulau Mare.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li><li>• Peningkatan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang didukung pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li><li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li><li>• Pemberian fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 516 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan jalur jelajah satwa;</li><li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li><li>• Reklamasi pascatambang;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li><li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li><li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	<p>Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Perspektif Gender, termasuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemajuan Kerangka Regulasi dan Kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam Menjaga Keberagaman dan Pemenuhan HAM Perempuan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 517 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah Daerah melalui Penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT Diklat Perancang PUU yang Berperspektif HAM;</li><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	Peningkatan kualitas perlindungan anak dengan <i>output</i> perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Maluku Utara	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 518 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Maluku Utara	Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi jalan dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 519 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Maluku Utara	Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif di antaranya, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil (kegiatan Daring se-Indonesia);</li><li>• Fasilitasi bagi Usaha Kecil yang Mendukung Makan Bergizi Gratis (kegiatan Daring se-Indonesia).</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua Barat

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 4

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas

- ❖ Kawasan Industri Fakfak – Kab. Fakfak
- ❖ Kawasan Pariwisata Teluk Triton – Kab. Kaimana
- ❖ Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Migas – Kab. Teluk Bintuni
- ❖ Kawasan Perkotaan (Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi) – Kab. Pegunungan Arfak
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan – Kab. Manokwari Selatan
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni
- ❖ Kawasan Swasembada Air – Kab. Teluk Bintuni, Kab. Kaimana
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak
- ❖ Kawasan Konservasi TN Teluk Cenderawasih – Kab. Teluk Wondama
- ❖ Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni – Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fakfak

### 39 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian PPN/Bappenas
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 521 -

**Provinsi Papua Barat**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: KI Fakfak (Kab. Fakfak)</li></ul>	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak dan percepatan hilirisasi industri petrokimia dalam memperkuat industri pupuk dalam negeri, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan <i>masterplan</i> dan studi kelayakan;</li><li>• Percepatan penerapan sistem perizinan terpadu;</li><li>• Pendampingan implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu;</li><li>• Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi;</li><li>• Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (olefin dan turunannya);</li><li>• Revitalisasi industri pupuk dan hilirisasi gas bumi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.</li></ul>
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A2: Kawasan Pariwisata Teluk Triton (Kab. Kaimana)</li></ul>	Penyiapan kawasan pariwisata Teluk Triton di Kab. Kaimana, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Pengembangan desa wisata;</li><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa.</li></ul>
<b>A3</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A3: Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Minyak dan Gas</li></ul>	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (minyak dan gas bumi) berorientasi ekspor di Kab. Teluk Bintuni, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 522 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Bumi (Kab. Teluk Bintuni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri;</li> <li>• Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka;</li> <li>• Fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri;</li> <li>• Pelatihan vokasi yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA);</li> <li>• Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (<i>Carbon Capture, Utilization, and Storage</i>), dan Compression (UCC Project), serta pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM);</li> <li>• Pengembangan industri metanol, amonia, dan pemanfaatan karbon dari hasil CCUS/CCS.</li> </ul>
<b>A4</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4: Kawasan Perkotaan Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak)</li> </ul>	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Penataan kawasan;</li> <li>• Penguatan <i>branding</i> kawasan;</li> <li>• Penguatan promosi daya tarik kota.</li> </ul>
<b>B1</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan: B1: Kab. Manokwari Selatan	Penguatan sentra perkebunan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 523 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li><li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li><li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li><li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil;</li><li>• Pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa;</li><li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li><li>• Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian;</li><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kawasan kakao.</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas Jalan Windesi–Ambuni;</li><li>• Peningkatan layanan angkutan jalan perintis;</li><li>• Lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana;</li><li>• Peningkatan layanan angkutan laut perintis;</li><li>• Peningkatan layanan angkutan penyeberangan perintis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 524 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik;</li> <li>• Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;</li> <li>• Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak.</li> </ul>
	Provinsi Barat Papua	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	• Kab. Manokwari Selatan (perkebunan)	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 525 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Kaimana (pariwisata)</li> <li>• Kab. Pegunungan Arfak (pariwisata)</li> <li>• Kab. Fakfak (industri pengolahan)</li> <li>• Kab. Teluk Bintuni (industri pengolahan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi;</li> <li>• Revitalisasi fasilitas pelatihan vokasi;</li> <li>• Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi.</li> </ul>
<b>C1</b> <b>C2</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Manokwari*</li> <li>• C2: Kab. Manokwari Selatan*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Pegunungan Arfak**</li> <li>• Kab. Teluk Wondama**</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki</p>	<p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian;</li> <li>• Penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik;</li> <li>• Pengembangan kawasan pertanian;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan terkait pangan lokal melalui Rumah Pangan B2SA;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	
<b>C1</b> <b>C3</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• C1: Kab. Manokwari*</li><li>• C3: Kab. Teluk Bintuni*</li></ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Pegunungan Arfak**</li><li>• Kab. Teluk Wondama**</li></ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>***) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Manokwari 3;</li><li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) +BESS Manokwari;</li><li>• Pembangunan infrastruktur sistem jaringan transmisi listrik dan gardu induk.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 527 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>C3</b> <b>C4</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C3: Kab. Teluk Bintuni*</li> <li>• C4: Kab. Kaimana*</li> </ul> <p>Kawasan Rawan Air</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Manokwari**</li> <li>• Kab. Manokwari Selatan**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p>	<p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, dengan <i>output</i> rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air.</p>
<b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b> <b>D4</b>	<p>Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kab. Manokwari Selatan</li> <li>• D2: Kab. Teluk Bintuni</li> </ul>	<p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 528 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3: Kab. Teluk Wondama</li> <li>• D4: Kab. Pegunungan Arfak</li> </ul> <p>Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p>	<p>dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi pertanian dan perikanan;</li> <li>• Pengembangan desa wisata;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);</li> <li>• Pengadaan sarana produksi dan alat mesin pertanian.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li> <li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li> <li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li> <li>• Pemberian pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah;</li> <li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li> <li>• Pemberian dukungan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun pada satuan PAUD;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 529 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum;</li><li>• Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
Provinsi Barat	Papua	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 530 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li></ul>
	Provinsi Barat Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 531 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li> <li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	Pengendalian penyakit malaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Manokwari</li> <li>• Kab. Manokwari Selatan</li> <li>• Kab. Teluk Bintuni</li> <li>• Kab. Teluk Wondama</li> <li>• Kab. Fakfak</li> <li>• Kab. Kaimana</li> </ul>	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS);</li> </ul>
	Pengendalian penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Teluk Bintuni</li> <li>• Kab. Manokwari Selatan</li> <li>• Kab. Pegunungan Arfak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kasus (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS).</li> </ul>
	Pengendalian penyakit filariasis,	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 532 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua Barat</li> </ul>	
	Provinsi Papua Barat	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li> <li>Peningkatan tata laksana PTM;</li> <li>Peningkatan kesehatan jiwa;</li> <li>Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li> <li>Peningkatan kualitas air minum.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan KIE;</li> <li>Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>Penerapan dan penegakan KTR;</li> <li>Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> : penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Papua Barat	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 533 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya;</li><li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li><li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li><li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li></ul>
	Provinsi Barat Papua	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 534 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Barat	<p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li> <li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li> <li>• Penguatan surveilans gizi dan KIA;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan keluarga terkait pengasuhan 1000 HPK.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li> <li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li> <li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat	<p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li> <li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li> <li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 535 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi;</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir;</li> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li> </ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans;</li> <li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li> <li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li> <li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li> <li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 536 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> </ul> <p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua Barat</li> </ul>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan <i>IUU Fishing</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah;</li> <li>Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua;</li> <li>Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut.</li> </ul>
	<p>Provinsi Papua Barat</p>	<p>Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>Penetapan hutan adat;</li> <li>Pengembangan hutan adat;</li> <li>Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li> <li>Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>
<b>E1</b> <b>E2</b>	<p>Kawasan Konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Teluk Wondama)</li> <li>E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab.</li> </ul>	<p>Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>Penanganan kasus tindak pidana LHK P21;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 537 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li><li>• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li><li>• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li><li>• Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li><li>• Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li><li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li><li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati.</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li><li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>• Rehabilitasi hutan dan lahan;</li><li>• Perlindungan jalur jelajah satwa;</li><li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li><li>• Pemulihan ekosistem perairan;</li><li>• Reklamasi pascatambang;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 538 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
Provinsi Barat	Papua	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 539 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li> <li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li> <li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li> </ul>
	Provinsi Barat Papua	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li> <li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</li> </ul>
	Provinsi Barat Papua	<p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li> <li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li> <li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li> <li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li> <li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 540 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Barat Papua	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 541 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN

### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

0

### Jumlah PSN

### Lokasi Prioritas

14

- ❖ Kawasan Pariwisata Biak - Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor
- ❖ Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura – Kota Jayapura
- ❖ Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan – Kota Jayapura, Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Keerom, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Energi – Kota Jayapura
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kab. Mamberamo Raya
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, dan Kab. Supiori
- ❖ Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kota Jayapura dan Kab. Biak Numfor
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Supiori
- ❖ Kawasan Transmigrasi – Kab. Keerom
- ❖ Kawasan Konservasi TN Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen
- ❖ Kawasan Konservasi TN Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
- ❖ Kawasan Konservasi KKN – Kab. Biak Numfor
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi – Kota Jayapura

### 38 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 542 -

**Provinsi Papua**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1: Kawasan Pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor)</li> </ul>	Penyiapan kawasan pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li> <li>• Pengembangan desa wisata;</li> <li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa.</li> </ul>
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2: Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura)</li> </ul>	Pengembangan kawasan perkotaan sedang Jayapura, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b> <b>B5</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kota Jayapura</li> <li>• B2: Kab. Biak Numfor</li> <li>• B3: Kab. Jayapura</li> <li>• B4: Kab. Kepulauan Yapen</li> <li>• B5: Kab. Waropen</li> </ul>	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra perikanan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 543 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi Jalan Ruas Sarmi – Arbais;</li><li>• Preservasi Jalan Ruas Menawi - Saubeba - Yobi II;</li><li>• Preservasi Jalan Warbo (Arso Vii) - Jaifuri (Arso iii);</li><li>• Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;</li><li>• Peningkatan layanan angkutan laut perintis;</li><li>• Peningkatan layanan angkutan penyeberangan perintis;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• OM BTS 4G/<i>Lastmile</i> Wilayah Papua;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan pengembangan sarana penunjang pelatihan SDM transportasi;</li><li>• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li><li>• Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T;</li><li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 544 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya.
	Provinsi Papua	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayapura (perikanan)</li> <li>• Kab. Biak Numfor (perikanan dan pariwisata)</li> <li>• Kota Jayapura (perikanan)</li> <li>• Kab. Kepulauan Yapen (perikanan)</li> <li>• Kab. Waropen (perikanan)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Universitas Cenderawasih melalui pembiayaan SBSN;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Papua (Fattahul Muluk) melalui pembiayaan SBSN.</li> </ul>
<b>C1</b>	Provinsi Papua	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua dengan <i>output</i> penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
	Kawasan Potensial Swasembada Pangan:	<p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan diversifikasi pangan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 545 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C2: Kab. Jayapura*</li> <li>• C3: Kab. Biak Numfor*</li> <li>• C4: Kota Jayapura*</li> <li>• C6: Kab. Kepulauan Yapen*</li> <li>• C7: Kab. Sarmi*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Mamberamo Raya**</li> <li>• Kab. Supiori**</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan kelapa dan kakao mendukung hilirisasi;</li> <li>• Pengembangan kawasan sagu penyedia pangan lokal;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan terkait pangan lokal melalui Rumah Pangan B2SA;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C2</b> <b>C5</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C2: Kota Jayapura*</li> </ul>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 546 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C5: Kab. Mamberamo Raya*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Supiori**</li> <li>• Kab. Kepulauan Yapen**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura;</li> <li>• Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi;</li> <li>• Penyiapan pembangunan pabrik ethanol dalam rangka industrialisasi energi;</li> <li>• Pemetaan potensi EBT lainnya.</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan Afirmasi	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i> :
<b>D2</b>	Daerah Tertinggal*:	
<b>D3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kab. Mamberamo Raya</li> <li>• D2: Kab. Waropen</li> <li>• D3: Kab. Supiori</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 547 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Keterangan:</p> <p>*) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan;</li> <li>• Pembangunan Jalan Towe Hitam – Oksibil;</li> <li>• Pembangunan Jembatan Mamberamo – Elelim;</li> <li>• Preservasi Jalan Bupul - Erambu – Sota;</li> <li>• Preservasi Jalan Mutung – Bupul.</li> </ul>
<b>D4</b>	Kawasan Afirmasi	<p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi;</li> <li>• Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Biak 3;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sarmi.</li> </ul>
<b>D5</b>	Kawasan	
<b>D6</b>	Perbatasan:	
<b>D7</b>	PKSN dan Wilayah	
<b>D8</b>	Pendukung	
<b>D9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D4: PKSN Jayapura (Kota Jayapura)</li> <li>• D5: PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor)</li> </ul>	
	Kecamatan Perbatasan Prioritas	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D6: Kec. Sawai (Kab.</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 548 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Mamberamo Raya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D7: Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi)</li> <li>• D8: Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom)</li> <li>• D9: Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori)</li> </ul>	
<b>D10</b>	<p>Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi (KT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D10: KT Senggi (Kab. Keerom)</li> </ul>	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi di Kab. Keerom, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li> <li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 549 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li><li>• Pemberian pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah;</li><li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
	Provinsi Papua	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 550 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• <i>Event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li><li>• <i>Event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 551 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li> <li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	<p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayapura</li> <li>• Kab. Kepulauan Yapen</li> <li>• Kab. Biak Numfor</li> <li>• Kab. Sarmi</li> <li>• Kab. Waropen</li> <li>• Kab. Supiori</li> </ul>	<p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia);</li> </ul>
	<p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Keerom</li> <li>• Kab. Jayapura</li> <li>• Kab. Sarmi</li> <li>• Kab. Mamberamo Raya</li> <li>• Kab. Waropen</li> <li>• Kab. Kepulauan Yapen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kasus (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia).</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 552 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Biak Numfor</li> <li>• Kab. Supiori</li> <li>• Kota Jayapura</li> </ul> <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua</li> </ul>	
	Provinsi Papua	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li> <li>• Peningkatan tata laksana PTM;</li> <li>• Peningkatan kesehatan jiwa;</li> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li> <li>• Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara.</li> </ul>
	Kab. Waropen	Peningkatan kapasitas Sarana RS Daerah Tipe D atau D Pratama menjadi setara Tipe C di Kab. Waropen.
	Provinsi Papua	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan KIE;</li> <li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li> <li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li> </ul>
	Provinsi Papua	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> : penguatan surveillans kualitas air minum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 553 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		dan kualitas udara dalam ruang serta pemucuan 5 pilar STBM.
	Provinsi Papua	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran;</li><li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li><li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li><li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi <i>pra-stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 554 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li> <li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li> <li>• Penguatan surveilans gizi dan KIA;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li> <li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li> <li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li> <li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li> <li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 555 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan;</li> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans;</li> <li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li> <li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li> <li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li> <li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li> </ul>
	<p>Pemberantasan IUU <i>Fishing</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> </ul>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU <i>Fishing</i>, dengan <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 556 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah;</li> <li>Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua;</li> <li>Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut.</li> </ul>
	Provinsi Papua	Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>Penetapan hutan adat;</li> <li>Pengembangan hutan adat;</li> <li>Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li> <li>Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>
<b>E1</b> <b>E2</b> <b>E3</b>	Kawasan Konservasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>E1: TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen)</li> <li>E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab.</li> </ul>	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);</li> <li>Penanganan kasus tindak pidana kehutanan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 557 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Jayapura, dan Kab. Keerom)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E3: KKN Padaido (Kab. Biak Numfor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> <li>Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li> <li>Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;</li> <li><i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKN Padaido.</li> </ul>
	<p>Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua</li> </ul> <p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E4: Kota Jayapura</li> </ul>	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li> <li>Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li> <li>Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li> <li>Pemulihan ekosistem mangrove;</li> <li>Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik;</li> <li>Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li> <li>Rehabilitasi hutan dan lahan;</li> <li>Perlindungan jalur jelajah satwa;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 558 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li><li>• Pemulihan ekosistem perairan;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 559 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li> <li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li> <li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li> <li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak;</li> <li>• Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</li> </ul>
	Provinsi Papua	<p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li> <li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 560 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Papua	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 561 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Papua	<p>Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dengan output:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan Promosi Industri Gim nasional;</li><li>• Fasilitasi Inkubasi dan Akselerasi <i>Startup</i> Gim Indonesia;</li><li>• Pembinaan/Pendampingan melalui Inkubasi <i>Startup</i> Digital;</li><li>• Pelatihan Talenta Digital yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 562 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua Pegunungan

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 0

### Jumlah PSN



### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Perkotaan Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Jayawijaya
- ❖ Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan – Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Energi – Kab. Jayawijaya
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) - Kab. Pegunungan Bintang
- ❖ Kawasan Konservasi TN Lorentz – Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya
- ❖ Kawasan Konservasi TN Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, Kab. Tolikara
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi – Kab. Lanny Jaya

### 34 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Intelijen Negara
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kebudayaan Kehutanan
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 563 -

**Provinsi Papua Pegunungan**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A1: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya)</li> </ul>	Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP);</li> <li>• <i>Land development</i> dan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru;</li> <li>• Fasilitasi prasarana pengendalian banjir di kawasan strategis.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kab. Jayawijaya</li> <li>• B2: Kab Lanny Jaya</li> <li>• B3: Kab. Tolikara</li> </ul>	Penguatan sentra perkebunan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Peningkatan kreativitas, informasi pasar, promosi dan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 564 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa;</li><li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li><li>• Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li><li>• Pengembangan kawasan kopi mendukung hilirisasi perkebunan.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi Jalan Elelim – Passvalley – BTS Kota Wamena;</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo;</li><li>• Pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li><li>• OM akses internet Papua dan Papua Barat;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 565 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mamberamo Tengah.</li> </ul>
	Provinsi Papua Pegunungan	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayawijaya (perkebunan)</li> <li>• Kab. Lanny Jaya (perkebunan)</li> <li>• Kab. Tolikara (perkebunan)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi fasilitas pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri;</li> <li>• Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.</li> </ul>
<b>C1</b>	Kawasan Potensial Swasembada Pangan:	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 566 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Jayawijaya*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Mamberamo Tengah**</li> <li>• Kab. Nduga**</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencetak lahan pertanian;</li> <li>• Dukungan alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C1</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Jayawijaya*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Pegunungan Bintang**</li> <li>• Kab. Yalimo**</li> </ul> <p>Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i> pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 567 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>***) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p>	
<p><b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b> <b>D4</b> <b>D5</b> <b>D6</b> <b>D7</b> <b>D8</b></p>	<p>Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kab. Jayawijaya</li> <li>• D2: Kab. Yahukimo</li> <li>• D3: Kab. Tolikara</li> <li>• D4: Kab. Nduga</li> <li>• D5: Kab. Lanny Jaya</li> <li>• D6: Kab. Yalimo</li> <li>• D7: Kab. Mamberamo Tengah</li> <li>• D8: Kab. Pegunungan Bintang</li> </ul> <p>Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p>	<p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</li> <li>• Peningkatan produksi pertanian;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital.</li> </ul>
<b>D9</b>	<p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan:  Kecamatan Perbatasan Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D9: Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec.</li> </ul>	<p>Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Pembangunan Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Oksibil - Iwur (BTS. Pegunungan Bintang/ Kab. Boven Digoel).</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 568 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim (Kab. Pegunungan Bintang)  Provinsi Papua Pegunungan	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li><li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li><li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum;</li><li>• Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 569 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li> <li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li> <li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li> </ul>
	Provinsi Papua Pegunungan	<p>Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.</p>
	Provinsi Papua Pegunungan	<p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayawijaya (Tradisi dan Budaya Lembah Baliem)</li> <li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li> <li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li> <li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li> <li>• Perlindungan warisan budaya;</li> <li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li> <li>• Produksi konten media kebudayaan;</li> <li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li> <li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 570 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li><li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data Kesehatan.</li></ul>
	Pengendalian penyakit malaria:	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 571 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayawijaya</li> <li>• Kab. Pegunungan Bintang</li> <li>• Kab. Tolikara</li> <li>• Kab. Nduga</li> <li>• Kab. Lanny Jaya</li> <li>• Kab. Mamberamo Tengah</li> <li>• Kab. Yalimo</li> <li>• Kab. Yahukimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) bagi masyarakat;</li> </ul>
	<p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Pegunungan Bintang</li> <li>• Kab. Yalimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kasus (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia).</li> </ul>
	<p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Pegunungan</li> </ul>	<p>Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li> <li>• Tata laksana PTM;</li> <li>• Peningkatan kesehatan jiwa;</li> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li> <li>• Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara;</li> <li>• Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam,</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 572 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		gula, dan lemak, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik.
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan KIE;</li> <li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li> <li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li> </ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</li> <li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li> <li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li></ul> <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li><li>• Layanan imunisasi dasar lengkap, dan skrining bayi baru lahir;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li></ul> <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li><li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li><li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li><li>• Penguatan surveilans gizi dan KIA;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 574 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Pegunungan Papua	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 575 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li> </ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans;</li> <li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li> <li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li> <li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li> <li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li> </ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah;</li> <li>• Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua.</li> </ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>• Penetapan hutan adat;</li> <li>• Pengembangan hutan adat;</li> <li>• Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li> <li>• Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 576 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>E1</b>	Kawasan Konservasi:	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i> :
<b>E2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: TN Lorentz (Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya)</li> <li>• E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, dan Kab. Tolikara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>• Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);</li> <li>• Penanganan kasus tindak pidana kehutanan;</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> <li>• Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati.</li> </ul>
<b>E3</b>	Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Pegunungan</li> </ul>	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i> :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 577 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: <ul style="list-style-type: none"><li>E3: Lanny Jaya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li><li>Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li><li>Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li><li>Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik;</li><li>Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>Rehabilitasi hutan dan lahan;</li><li>Perlindungan jalur satwa;</li><li>Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li><li>Pemulihan ekosistem perairan;</li><li>Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	Peningkatan <i>smart government</i> , penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li><li>Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li><li>Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 578 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li><li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 579 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Pegunungan Papua	<p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 580 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 581 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua Tengah

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



Program Makan Bergizi Gratis

0

Jumlah PSN

### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire
- ❖ Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak – Kab. Mimika
- ❖ Kawasan Perkotaan Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Nabire
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan – Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Puncak Jaya
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan – Kab. Nabire, Kab. Mimika
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Energi – Kab. Nabire, Kab. Mimika
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Mimika
- ❖ Kawasan Konservasi TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire
- ❖ Kawasan Konservasi TN Lorentz – Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya
- ❖ Kawasan Konservasi TN Mamberamo Foja – Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi – Kab. Deiyai

### 39 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 582 -

**Provinsi Papua Tengah**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A3</b>	Kawasan Pertumbuhan: A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)	Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP);</li><li>• <i>Land development</i> dan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru;</li><li>• Perluasan jaringan perpipaan SPAM KPP Papua Tengah;</li><li>• Pembangunan sistem drainase utama/primer.</li></ul>
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire)</li></ul>	Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cenderawasih di Kab. Nabire, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Pengembangan desa wisata;</li><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa.</li></ul>
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga-perak (Kab. Mimika)</li></ul>	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui pengembangan industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan;</li><li>• Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri;</li><li>• Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka;</li><li>• Fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 583 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan vokasi industri yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kab. Paniai</li> <li>• B2: Kab. Dogiyai</li> <li>• B3: Kab. Puncak Jaya</li> </ul>	Penguatan sentra perkebunan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan;</li> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa;</li> <li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li> <li>• Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.</li> </ul>
<b>B4</b> <b>B5</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• B4: Kab. Nabire</li> <li>• B5: Kab. Mimika</li> </ul>	Penguatan sentra perikanan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 584 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Tengah Papua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li><li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li><li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li><li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li><li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi.</li></ul> <p>Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi dan pendampingan peningkatan manajemen mutu produk;</li><li>• Fasilitasi usaha yang mendukung Makan Bergizi Gratis.</li></ul>
	Provinsi Tengah Papua	<p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan layanan angkutan penyeberangan perintis;</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis penumpang;</li><li>• Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang;</li><li>• Angkutan udara perintis kargo;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 585 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten Mimika.</li> </ul>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Mimika (perikanan dan pertambangan)</li> <li>• Kab. Paniai (perkebunan)</li> <li>• Kab. Dogiyai (perkebunan)</li> <li>• Kab. Puncak Jaya (perkebunan)</li> <li>• Kab. Nabire (perikanan dan pariwisata)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi fasilitas pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan mutu, kompetensi SDM, dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri;</li> <li>• Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 586 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>C1</b> <b>C2</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Nabire*</li> <li>• C2: Kab. Mimika*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Puncak Jaya**</li> <li>• Kab. Intan Jaya**</li> <li>• Kab. Dogiyai**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan perkebunan prioritas komoditas kelapa;</li> <li>• Pengembangan komoditas pangan lokal kawasan sagu;</li> <li>• Mencetak lahan pertanian;</li> <li>• Dukungan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C1</b> <b>C2</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Nabire*</li> <li>• C2: Kab. Mimika*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 587 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Puncak Jaya**</li> <li>• Kab. Intan Jaya**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Timika 2.</li> </ul>
<b>D1</b>	Kawasan Afirmasi	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan.</li> </ul>
<b>D2</b>	Daerah Tertinggal*:	
<b>D3</b>	• D1: Kab. Paniai	
<b>D4</b>	• D2: Kab. Dogiyai	
<b>D5</b>	• D3: Kab. Deiyai	
<b>D6</b>	• D4: Kab. Puncak	
	• D5: Kab. Puncak Jaya	
	• D6: Kab. Intan Jaya	
	*)Daerah tertinggal juga sudah	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 588 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	termasuk daerah sangat tertinggal	
<b>D7</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan:  Kecamatan perbatasan prioritas <ul style="list-style-type: none"><li>• D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika)</li></ul>	Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i> operasional dan pemeliharaan akses internet.
Provinsi Tengah	Papua	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li><li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li><li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 589 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum;</li><li>• Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
Provinsi Tengah	Papua	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
Provinsi Tengah	Papua	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 590 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li></ul>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, pustu, dan posyandu;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 591 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li> <li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	Pengendalian penyakit malaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Paniai</li> <li>• Kab. Dogiyai</li> <li>• Kab. Intan Jaya</li> <li>• Kab. Deiyai</li> <li>• Kab. Puncak</li> <li>• Kab. Puncak Jaya</li> <li>• Kab. Nabire</li> <li>• Kab. Mimika</li> </ul>	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS);</li> </ul>
	Pengendalian penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Paniai</li> <li>• Kab. Nabire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kasus (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS);</li> </ul>
	Pengendalian filariasis kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia.</li> </ul>	
	Provinsi Papua Tengah	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 592 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini;</li><li>• Peningkatan tata laksana PTM;</li><li>• Peningkatan kesehatan jiwa;</li><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li><li>• Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara.</li></ul>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan KIE;</li><li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li><li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li><li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li><li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li></ul>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</li><li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 593 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>prevention <i>stunting</i> through various media;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dissemination for increasing community confidence towards government policies regarding <i>stunting</i> prevention and acceleration of <i>stunting</i> prevalence reduction;</li> <li>• Communication of behavior change, especially feeding behavior;</li> <li>• Facilitation/supervision of areas related to efforts to improve nutritional status and increase maternal health services and newborn care;</li> <li>• Strengthening of program implementation;</li> <li>• Meeting the service coverage of interventions according to the needs of target groups (such as increasing ASI exclusivity, immunization, early detection through growth monitoring, <i>antenatal care</i> (ANC), service for mothers and malnourished children <i>pra-stunting</i>, meeting clean water and sanitation, increasing food security, counseling, and others).</li> </ul> <p>Reduction of maternal and child mortality, with <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase in capacity related to maternal and newborn health services and malnourished children;</li> <li>• Increase in quality and service of postnatal family planning;</li> <li>• Increase in quality of PONEK-PONED;</li> <li>• Basic immunization services complete and newborn screening;</li> <li>• Strengthening of integrated planning and budgeting.</li> </ul> <p>Improvement of community health and nutrition, with <i>output</i>:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 594 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li><li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li><li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li><li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI;</li></ul> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li><li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li><li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li></ul> <p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li><li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li><li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 595 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul> <p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan;</li> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li> </ul>
	Provinsi Papua Tengah	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans;</li> <li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li> <li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li> <li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li> <li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li> </ul>
	Pemberantasan IUU Fishing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> <li>• WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia)</li> </ul>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah;</li> <li>• Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 596 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua Tengah</li> </ul>	
	<p>Provinsi Papua Tengah</p>	<p>Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>Penetapan hutan adat;</li> <li>Pengembangan hutan adat;</li> <li>Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li> <li>Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>
<b>E1</b>	Kawasan	<p>Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);</li> <li>Penanganan kasus tindak pidana kehutanan;</li> <li>Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> </ul>
<b>E2</b>	Konservasi:	
<b>E3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire)</li> <li>E2: TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai)</li> <li>E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya)</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 597 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> <li>• Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati.</li> </ul>
<b>E4</b>	<p>Lingkungan Hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Tengah</li> </ul> <p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E4: Kab. Deiyai</li> </ul>	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li> <li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li> <li>• Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim;</li> <li>• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik;</li> <li>• Penguatan kelompok perumahan sosial;</li> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan;</li> <li>• Perlindungan jalur jelajah satwa;</li> <li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li> <li>• Pemulihan ekosistem perairan;</li> <li>• Reklamasi pascatambang;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 598 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>
Provinsi Tengah	Papua	<p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li></ul>
Provinsi Tengah	Papua	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
Provinsi Tengah	Papua	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 599 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
Provinsi Tengah	Papua	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
Provinsi Tengah	Papua	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 600 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Tengah  Papua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul> <p>Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua Selatan

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN



### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 2

### Jumlah PSN

### Lokasi Prioritas



- ❖ Kawasan Pariwisata Kawasan Asmat – Kab. Asmat
- ❖ Kawasan Perkotaan Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Merauke
- ❖ Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan – Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat
- ❖ Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan – Kab. Merauke
- ❖ Kawasan Sentra Produksi Pangan – Kab. Merauke
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan dan Energi – Kab. Merauke
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Mappi
- ❖ Kawasan Perbatasan (PKSN dan Wilayah Pendukung) – Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Asmat, Kab. Mappi
- ❖ Kawasan Transmigrasi – Kab. Merauke
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas – Kab. Merauke
- ❖ Kawasan Konservasi TN Lorentz – Kab. Asmat
- ❖ Kawasan Konservasi TN Wasur – Kab. Merauke

### 38 Kementerian/Lembaga terkait

- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 602 -

**Provinsi Papua Selatan**

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A2: Kab. Merauke</li></ul>	Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP);</li><li>• Penataan kawasan mendukung Daerah Otonomi Baru;</li><li>• Optimalisasi SPAM Rawa Biru Kab. Merauke Wilayah Papua Selatan;</li><li>• Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air.</li></ul>
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• A1: Kawasan Asmat (Kab. Asmat)</li></ul>	Penyiapan kawasan Asmat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal;</li><li>• Pengembangan produk ekonomi lokal;</li><li>• Pengembangan desa wisata;</li><li>• Promosi terpadu secara nasional dan internasional;</li><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa.</li></ul>
<b>B4</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan: <ul style="list-style-type: none"><li>• B4: Kab. Merauke</li></ul>	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra perikanan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li><li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li><li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 603 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;</li> </ul>
<b>B1</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perkebunan:	Penguatan sentra perkebunan, dengan <i>output</i> :
<b>B2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Pendampingan IKM/UMKM, BUM Desa, dan koperasi;</li> <li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li> </ul>
<b>B3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kab. Merauke</li> <li>• B2: Kab. Mappi</li> <li>• B3: Kab. Asmat</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 604 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian;</li><li>• Pengembangan kawasan perkebunan prioritas melalui kawasan kelapa;</li><li>• Pengembangan pangan lokal melalui kawasan sagu;</li><li>• Mencetak lahan pertanian.</li></ul> <p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanganan jalan daerah;</li><li>• Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Iwur–Waropko);</li><li>• Preservasi Jalan BTS. Kab. Boven Digoel/Merauke – Muting – Bupul;</li><li>• Rekonstruksi Jalan Bupul – Erambu;</li><li>• Penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis;</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis penumpang;</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis kargo;</li><li>• Pengembangan angkutan BBM pesawat udara;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 605 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li> <li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li> <li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 harga dan atau pengawasan operasional BBM 1 harga di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.</li> </ul> <p>Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li> <li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan)</li> <li>• Kab. Mappi (perkebunan)</li> <li>• Kab. Asmat (perkebunan)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi fasilitas pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri;</li> <li>• Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja;</li> <li>• Pelatihan keterampilan digital dasar.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 606 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Selatan	<p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Salor, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi geospasial melalui rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025;</li> <li>• Penguatan <i>On Farm</i> melalui dukungan input dan alat mesin pertanian;</li> <li>• Penguatan <i>Off Farm</i> melalui pengembangan kawasan transmigrasi dan pelatihan kepada petani;</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan infrastruktur;</li> <li>• Peningkatan Ruas Jalan Simpang 3 Salor - Jembatan Bian;</li> <li>• Pembangunan Jembatan Ruas Kaliki - Nakias;</li> <li>• Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Bian - Simpang Kwensid;</li> <li>• Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian.</li> </ul>
<b>C1</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Merauke*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Boven Digoel**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p>	<p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservasi Jalan Bupul - Erambu - Sota;</li> <li>• Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian;</li> <li>• Dukungan sarana prasarana serta alat dan mesin pertanian;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 607 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani.</li> </ul>
<b>C1</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Merauke*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Mappi**</li> <li>• Kab. Asmat**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i> pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 608 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>D1</b> <b>D2</b> <b>D3</b>	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kab. Boven Digoel</li> <li>• D2: Kab. Asmat</li> <li>• D3: Kab. Mappi</li> </ul> Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</li> <li>• Pengembangan desa wisata;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, serta layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi.</li> </ul>
<b>D4</b> <b>D5</b> <b>D6</b> <b>D7</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKS N dan Wilayah Pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>• D4: PKS N Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke)</li> <li>• D5: PKS N Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkwi (Kab. Boven Digoel)</li> </ul>	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet;</li> <li>• Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi;</li> <li>• Preservasi Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Bupul - Erambu - Sota;</li> <li>• Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 609 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Kecamatan Perbatasan Prioritas <ul style="list-style-type: none"> <li>• D6: Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat)</li> <li>• D7: Kec. Minyamur (Kab. Mappi)</li> </ul>	
<b>D8</b>	Kawasan Afirmasi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting di Kab. Merauke, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpindahan dan penempatan transmigran;</li> <li>• Pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pembangunan sistem drainase di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pembangunan jembatan di kawasan transmigrasi;</li> <li>• Pemberian sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi.</li> </ul>
<b>D9</b>	Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"> <li>• D8: KT. Salor (Kab. Merauke)</li> <li>• D9: KT. Muting (Kab. Merauke)</li> </ul>	
<b>D10</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D10: Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan (Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind) (Kab. Merauke)</li> </ul>	Pengembangan Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan (Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li> <li>• Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li> <li>• Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li> <li>• Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 610 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li><li>• Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li><li>• Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li><li>• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li><li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li><li>• Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li><li>• Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 611 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum;</li><li>• Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah.</li></ul> <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 613 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li> <li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li> </ul>
	Pengendalian penyakit malaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Merauke</li> <li>• Kab. Asmat</li> <li>• Kab. Boven Digoel</li> <li>• Kab. Mappi</li> </ul>	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat, bahan alat, dan pembekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) bagi masyarakat;</li> <li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, rambusia) bagi masyarakat;</li> </ul>
	Pengendalian penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Mappi</li> <li>• Kab. Boven Digoel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan kasus (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, kusta, malaria, HIV/AIDS, filariasis, frambusia).</li> </ul>
	Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Selatan</li> </ul>	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM;</li> <li>• Peningkatan kesehatan jiwa;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 614 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li> <li>• Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan KIE;</li> <li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li> <li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i>: penguatan surveillans kualitas air minum dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li> <li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li> <li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li> <li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 615 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konvergensi layanan pada kelompok sasaran.</li> </ul> <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li> <li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li> <li>• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li> </ul> <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li> <li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li> <li>• Penguatan surveilans gizi dan KIA;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li> <li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 616 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li> <li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li> <li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li> <li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah;</li> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li> </ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 617 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<p>mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan surveilans;</li><li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li><li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li><li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li><li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li></ul>
	<p>Pemberantasan IUU Fishing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WPP 718 (perbatasan dengan Australia)</li></ul> <p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Papua Selatan</li></ul>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah;</li><li>• Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua.</li></ul>
	<p>Provinsi Papua Selatan</p>	<p>Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li><li>• Penetapan hutan adat;</li><li>• Pengembangan hutan adat;</li><li>• Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li><li>• Pemberdayaan warga komunitas adat terpencil;</li><li>• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 618 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		yang dilengkapi peta deliniasi tanah adat/ulayat.
<b>E1</b> <b>E2</b>	Kawasan Konservasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: TN Lorentz (Kab. Asmat)</li> <li>• E2: TN Wasur (Kab. Merauke)</li> </ul>	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut);</li> <li>• Penanganan kasus tindak pidana kehutanan;</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>• Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>• Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> <li>• Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li> <li>• Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem;</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 619 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Papua Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem.</li></ul> <p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li><li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li><li>• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li><li>• Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim;</li><li>• Pemulihan ekosistem mangrove;</li><li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li><li>• Rehabilitasi hutan dan lahan;</li><li>• Perlindungan jalur jelajah satwa;</li><li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li><li>• Pemulihan ekosistem perairan;</li><li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 620 -

<b>Kode</b>	<b>Lokasi Prioritas</b>	<b>Highlight Intervensi</b>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li><li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li><li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li><li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li><li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li><li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan,</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 621 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<p>termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li><li>• Pemajuan Kerangka Regulasi dan Kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam Menjaga Keberagaman dan Pemenuhan HAM Perempuan;</li><li>• Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM;</li><li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li><li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li><li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Papua Selatan	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li><li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 622 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Papua Selatan	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb)*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 623 -

## Seputar *Highlight* Intervensi Provinsi Papua Barat Daya

### Ringkasan Prioritas Nasional



\*satu proyek dapat mendukung beberapa PN

### 4 Program Direktif Presiden

1. Sekolah Rakyat
2. Digitalisasi Pendidikan
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan



### Program Makan Bergizi Gratis

# 1

### Jumlah PSN

### Lokasi Prioritas



- ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat – Kab. Raja Ampat
- ❖ Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa – Kota Sorong
- ❖ Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan - Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan, dan Kab. Sorong
- ❖ Kawasan Swasembada Pangan – Kab. Sorong dan Kab. Sorong Selatan
- ❖ Kawasan Swasembada Energi – Kab. Sorong
- ❖ Daerah Tertinggal – Kab. Tambrauw dan Kab. Maybrat
- ❖ Kawasan Perbatasan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) – Kab. Raja Ampat dan Kab. Tambrauw
- ❖ Kawasan Transmigrasi Klamono – Segun – Kab. Sorong
- ❖ Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat – Kab. Raja Ampat
- ❖ Geopark Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat – Kab. Raja Ampat
- ❖ Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni – Kab. Sorong Selatan
- ❖ Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi – Kota Sorong dan Kab. Maybrat

### 41 Kementerian/Lembaga terkait



- ❖ Kementerian Pekerjaan Umum
- ❖ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- ❖ Kementerian Pariwisata
- ❖ Kementerian Perindustrian
- ❖ Kementerian Perdagangan
- ❖ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- ❖ Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- ❖ Kementerian Koperasi
- ❖ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- ❖ Kementerian Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kementerian Perhubungan
- ❖ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- ❖ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- ❖ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- ❖ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- ❖ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❖ Kementerian Keuangan
- ❖ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Badan Pangan Nasional
- ❖ Kementerian Ketenagakerjaan
- ❖ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- ❖ Kementerian Pemuda dan Olahraga
- ❖ Kementerian Pertanian
- ❖ Kementerian Kesehatan
- ❖ Kementerian Agama
- ❖ Kementerian Sosial
- ❖ Kementerian Komunikasi dan Digital
- ❖ Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ❖ Badan Gizi Nasional
- ❖ Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- ❖ Kementerian Dalam Negeri
- ❖ Kementerian Kebudayaan
- ❖ Kementerian Kehutanan
- ❖ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- ❖ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- ❖ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- ❖ Kementerian Hak Asasi Manusia
- ❖ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- ❖ Kementerian Transmigrasi
- ❖ Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- ❖ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 624 -

**Provinsi Papua Barat Daya**

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
<b>A1</b>	Kawasan Pertumbuhan: A1: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat)	Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendukung <i>event</i> daerah;</li><li>• Pengembangan desa wisata;</li><li>• Pengembangan jejaring di destinasi pariwisata;</li><li>• Pelaksanaan kegiatan (<i>events</i>) nasional dan internasional;</li><li>• Fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata;</li><li>• pelatihan vokasi di sektor strategis;</li><li>• Peningkatan publikasi dan promosi terpadu secara nasional dan internasional;</li><li>• Fasilitasi akses pembiayaan pariwisata berkualitas;</li><li>• Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;</li><li>• Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam;</li><li>• Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa;</li><li>• Pelaksanaan operasi SAR.</li></ul>
<b>A2</b>	Kawasan Pertumbuhan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kawasan Perkotaan Industri,</li></ul>	Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kawasan perkotaan industri, perdagangan, dan jasa, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 625 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kawasan mendukung daerah otonomi baru;</li> <li>• Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM KPP Papua Barat Daya;</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Institut Agama Islam Negeri Sorong melalui pembiayaan SBSN.</li> </ul>
<b>B1</b> <b>B2</b> <b>B3</b>	Kawasan Komoditas Unggulan Berbasis Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• B1: Kota Sorong</li> <li>• B2: Kab. Sorong Selatan</li> <li>• B3: Kab. Sorong</li> </ul>	Penguatan sentra perikanan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi pasar rakyat;</li> <li>• Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha;</li> <li>• Fasilitasi kemitraan pemasaran;</li> <li>• Fasilitasi misi dagang dan <i>business matching</i>;</li> <li>• Fasilitasi Sertifikasi produk dalam negeri;</li> <li>• Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Pengelolaan keuangan pelaku usaha;</li> <li>• Promosi pameran produk dalam negeri;</li> <li>• Bantuan peralatan/sarana perdagangan;</li> <li>• Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik;</li> <li>• Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan melalui Kartu Usaha;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i> :



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 626 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan layanan angkutan jalan perintis;</li><li>• Layanan angkutan penyeberangan perintis;</li><li>• Pengembangan angkutan udara perintis penumpang;</li><li>• Pengendalian pembangunan pembangkit listrik;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk;</li><li>• Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi;</li><li>• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;</li><li>• OM BTS 4G /Lastmile Wilayah Papua;</li><li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li><li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li><li>• Pemeliharaan infrastruktur pencarian dan pertolongan;</li><li>• Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T;</li><li>• Supervisi progres pembangunan penyalur BBM 1 Harga dan/atau pengawasan operasional BBM 1 Harga di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrau.</li></ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Fasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);</li><li>• Bantuan subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 627 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi dana desa untuk perumahan;</li> <li>• Penanganan pemukiman kumuh terpadu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Sorong (perikanan)</li> <li>• Kab. Sorong Selatan (perikanan)</li> <li>• Kota Sorong (perikanan dan industri)</li> <li>• Kab. Raja Ampat (pariwisata)</li> </ul>	<p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) serta pelatihan vokasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan pusat pelatihan keterampilan (pelatihan budidaya perikanan, pertanian organik, atau manajemen wisata);</li> <li>• Revitalisasi fasilitas pendidikan atau pelatihan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital;</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri;</li> <li>• Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri;</li> <li>• Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi;</li> <li>• Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja.</li> </ul>
<b>C1</b> <b>C2</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Sorong*</li> <li>• C2: Kab. Sorong Selatan*</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Rawan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Tambrauw**</li> <li>• Kab. Maybrat**</li> </ul>	<p>Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana produksi pendukung pengembangan pertanian pangan;</li> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan, nelayan, dan pembudidaya ikan;</li> <li>• Pengembangan pangan akuatik;</li> <li>• Pengembangan komoditas pangan lokal melalui kawasan sagu;</li> <li>• Pengembangan kawasan perkebunan;</li> <li>• Pengembangan ternak ruminansia potong;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 628 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan input dan sarana-prasarana pertanian;</li> <li>• Penguatan, pelayanan, dan penyidikan kesehatan hewan;</li> <li>• Pengembangan pangan hewani melalui layanan optimalisasi reproduksi;</li> <li>• Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah;</li> <li>• Penjaminan keamanan mutu dan kualitas pangan;</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani dan pemberdayaan penyuluhan;</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan regenerasi petani;</li> <li>• Pengembangan kelapa dalam dan industri turunannya.</li> </ul>
<b>C1</b>	<p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Sorong*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Sorong Selatan**</li> <li>• Kab. Raja Ampat**</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <p>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi</p> <p>**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah</p>	<p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Raja Ampat;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sorong;</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sorong;</li> <li>• Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 629 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	
<b>D1</b> <b>D2</b>	Kawasan Afirmasi - Daerah Tertinggal*: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1: Kab. Tambrau</li> <li>• D2: Kab. Maybrat</li> </ul> *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;</li> <li>• Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2;</li> <li>• Peningkatan produksi perikanan;</li> <li>• Pengembangan UMKM lokal;</li> <li>• Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat;</li> <li>• Perluasan layanan penyiaran digital;</li> <li>• Pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan.</li> </ul>
<b>D3</b> <b>D4</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan  Kecamatan Perbatasan Prioritas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3: Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau (Kab. Raja Ampat)</li> </ul>	Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana permukiman;</li> <li>• Pembangunan ketenagalistrikan dan energi;</li> <li>• Pembangunan pelayanan pendidikan;</li> <li>• Pembangunan pelayanan kesehatan;</li> <li>• Pembangunan layanan konektivitas;</li> <li>• Perluasan jaringan telekomunikasi;</li> <li>• Peningkatan akses internet dan listrik;</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"><li>D4: Kec. Kwoor dan Kec. Abun (Kab. Tambrau)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi kampung siaga bencana;</li><li>Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan.</li></ul>
<b>D5</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi (KT) <ul style="list-style-type: none"><li>D5: KT Klamono-Segun - (Kab. Sorong)</li></ul>	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun di Kab. Sorong, dengan <i>output</i> pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi.
<b>D6</b>	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas <ul style="list-style-type: none"><li>D6: Kab. Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Misool, Kabupaten Raja Ampat)</li></ul>	Pengembangan Kawasan Perdesaan Misool di Kab. Raja Ampat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan;</li><li>Pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan;</li><li>Fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata;</li><li>Sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan;</li><li>Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi);</li><li>Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi);</li><li>Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal;</li><li>Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 631 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Papua Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.</li></ul> <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;</li><li>• Tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen;</li><li>• Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) ) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP);</li><li>• Pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA;</li><li>• Pembangunan puskesmas yang memadai;</li><li>• Pembangunan sekolah yang memadai;</li><li>• Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan;</li><li>• Pembinaan program literasi pada generasi muda;</li><li>• Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca;</li><li>• Peningkatan literasi digital;</li><li>• Penyusunan model kurikulum;</li><li>• Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual;</li><li>• Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK;</li><li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah di seluruh jenjang pendidikan yang sudah mengalami kerusakan;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan unit sekolah baru;</li><li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Program Indonesia Pintar (PIP).</li></ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan <i>output</i> talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan;</li><li>• Pembinaan lembaga kebudayaan;</li><li>• Fasilitasi kemitraan warisan budaya;</li><li>• Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya;</li><li>• Perlindungan warisan budaya;</li><li>• <i>Event</i> prioritas bidang kebudayaan;</li><li>• Produksi konten media kebudayaan;</li><li>• Pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal;</li><li>• Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah;</li><li>• Pengembangan <i>Event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah.</li></ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak;</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 633 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi layanan <i>telemedicine</i>;</li><li>• Peningkatan sarana puskesmas, unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan, dan posyandu;</li><li>• Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit;</li><li>• Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat;</li><li>• Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan;</li><li>• Pembangunan fasilitas kesehatan melalui konstruksi bangunan modular;</li><li>• Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak;</li><li>• Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;</li><li>• Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;</li><li>• Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan;</li><li>• Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan primer di daerah;</li><li>• Peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan dan kualitas data kesehatan.</li></ul>
	Pengendalian penyakit malaria: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Tambrau</li><li>• Kab. Sorong</li><li>• Kab. Raja Ampat</li><li>• Kota Sorong</li></ul>	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan obat, bahan, dan alat, dan perbekalan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) bagi masyarakat</li><li>• Penanggulangan TB di tempat kerja;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 634 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Maybrat</li> </ul> Pengendalian penyakit TBC: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Sorong Selatan</li> <li>• Kab. Sorong</li> <li>• Kab. Tambrauw</li> <li>• Kab. Maybrat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TB;</li> <li>• Penemuan aktif dan <i>Skrining mobile</i> penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS);</li> <li>• Pelaporan kasus (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS) penyakit menular oleh fasyankes swasta;</li> <li>• Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit menular (TBC, malaria, filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS).</li> </ul>
	Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Barat Daya</li> </ul>	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan deteksi dini;</li> <li>• Peningkatan tata laksana PTM;</li> <li>• Peningkatan kesehatan jiwa;</li> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat;</li> <li>• Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan KIE;</li> <li>• Pelaksanaan skrining penyakit dan faktor risiko penyakit;</li> <li>• Peningkatan layanan dan kapasitas konseling UBM;</li> <li>• Penerapan dan penegakan KTR;</li> <li>• Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik memenuhi kriteria.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Penyehatan lingkungan dengan <i>output</i> : penguatan surveillans kualitas air minum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 635 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Provinsi Papua Barat Daya	<p>dan kualitas udara dalam ruang serta pemicuan 5 pilar STBM.</p> <p>Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil;</li><li>• Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media;</li><li>• Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan <i>stunting</i> dan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i>;</li><li>• Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan;</li><li>• Pemenuhan cakupan layanan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (seperti peningkatan ASI eksklusif, imunisasi, deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, <i>antenatal care</i> (ANC), tata laksana bagi ibu dan balita bermasalah gizi pra-<i>stunting</i>, pemenuhan air minum sanitasi, peningkatan ketahanan pangan, pendampingan, dan lain-lain).</li></ul> <p>Penurunan kematian ibu dan anak, dengan <i>output</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta balita;</li><li>• Peningkatan kualitas dan layanan KB pasca persalinan;</li><li>• Peningkatan kualitas PONEK-PONED;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 636 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan imunisasi dasar lengkap dan skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi.</li> </ul> <p>Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;</li> <li>• Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA;</li> <li>• Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta;</li> <li>• Penguatan surveilans gizi dan KIA;</li> <li>• Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan keluarga terkait pengasuhan 1000 HPK.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	<p>Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining usia sekolah, dewasa, dan lansia;</li> <li>• Penguatan UKS, kesehatan kerja, layanan geriatri;</li> <li>• Peningkatan pelayanan KB dan kespro yang komprehensif berdasarkan siklus hidup.</li> </ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	<p>Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan BMHP untuk Skrining kesehatan;</li> <li>• Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel Skrining bayi baru lahir;</li> <li>• Pelaksanaan tes konfirmasi sampel Skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 637 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
	Provinsi Papua Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;</li><li>• Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.</li></ul> <p>Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi;</li><li>• Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir;</li><li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada Pustu, Puskesmas, dan RSUD.</li></ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	<p>Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan surveilans;</li><li>• Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah;</li><li>• Pemenuhan sediaan farmasi;</li><li>• Pengendalian resistensi antimikroba;</li><li>• Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 638 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	<p>Pemberantasan IUU <i>Fishing</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> </ul> <p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua Barat Daya</li> </ul>	<p>Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU <i>Fishing</i>, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah;</li> <li>Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua.</li> </ul>
	<p>Provinsi Papua Barat Daya</p>	<p>Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ ulayat, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat;</li> <li>Penetapan hutan adat;</li> <li>Pengembangan hutan adat;</li> <li>Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat;</li> <li>Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).</li> </ul>
<b>E1</b> <b>E2</b>	<p>Kawasan Konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E1: <i>Geopark</i> Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat (Kab. Raja Ampat)</li> <li>E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman</li> </ul>	<p>Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi;</li> <li>Penguatan perencanaan kawasan konservasi;</li> <li>Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi;</li> <li>Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 639 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
	Hayati Teluk Bintuni (Kab. Sorong Selatan)	<p>Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi;</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat;</li> <li>• Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati;</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata;</li> <li>• Fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat;</li> <li>• <i>Oceans for Prosperity</i> LAUTRA - KKN Kepulauan Raja Ampat, KKN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, KKD Kepulauan Raja Ampat.</li> </ul>
<b>E3</b>	Lingkungan Hidup:	<p>Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon;</li> <li>• Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur;</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim;</li> <li>• Penyediaan bangunan konservasi air;</li> <li>• Penyediaan bangunan antisipasi anomali iklim;</li> <li>• Pemulihan ekosistem mangrove;</li> <li>• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik untuk mitigasi ancaman tsunami;</li> <li>• Penguatan kelompok perhutanan sosial;</li> </ul>
<b>E4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua Barat Daya</li> </ul> <p>Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E3: Kota Sorong</li> <li>• E4: Kab. Maybrat</li> </ul>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 640 -

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan;</li> <li>• Perlindungan jalur jelajah satwa;</li> <li>• Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</li> <li>• Pemulihan ekosistem perairan;</li> <li>• Reklamasi pasca tambang;</li> <li>• Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi.</li> </ul>
	Provinsi Barat Daya Papua	<p>Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>Platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah berbasis interoperabilitas;</li> <li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM;</li> <li>• Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.</li> </ul>
	Provinsi Barat Daya Papua	<p>Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;</li> <li>• Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.</li> </ul>
	Provinsi Barat Daya Papua	<p>Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan perspektif gender, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dengan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 641 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;</li> <li>• Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;</li> <li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, termasuk pemulihan di wilayah konflik/pasca konflik;</li> <li>• Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan;</li> <li>• Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong peran dan kepemimpinan perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;</li> <li>• Pendidikan HAM bagi K/L/D;</li> <li>• Pelaksanaan ToT diklat perancang PUU yang berperspektif HAM.</li> </ul>
	Provinsi Barat Daya Papua	Peningkatan kualitas perlindungan anak, dengan <i>output</i> perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Barat Daya Papua	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers;</li> <li>• Verifikasi terhadap perusahaan pers;</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 642 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;</li><li>• Fasilitasi uji kompetensi wartawan;</li><li>• Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pers;</li><li>• Penyusunan rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia;</li><li>• Penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran;</li><li>• Pengawasan lembaga penyiaran TV dan radio;</li><li>• Penyiaran informasi publik dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;</li><li>• Pelatihan bidang jurnalistik;</li><li>• Pelatihan SDM bidang penyiaran.</li></ul>
	Provinsi Papua Barat Daya	Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dengan <i>output</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian;</li><li>• Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;</li><li>• Peningkatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;</li><li>• Peningkatan pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;</li><li>• Akreditasi lembaga halal;</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 643 -

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Intervensi</i>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan kemitraan penjaminan produk halal.</li></ul>

*Keterangan: Highlight Intervensi bersumber dari pendanaan APBN maupun Non-APBN (APBD, Swasta, KPBU, dsb).*

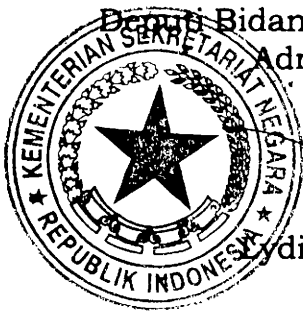
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman